



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sestama : Bakamla
Hari, Tanggal	: Kamis, 13 September 2021
Pukul	: 13.00 – 15.05 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, : Lantai 1.
Ketua Rapat	: Drs. Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: 1. Rencana legislasi tentang Keamanan Laut; 2. Strategi dan kebijakan penguatan kelembagaan; 3. Sarana dan prasarana Bakamla;
Hadir	: 4. Kebutuhan alokasi anggaran ideal Keamanan Laut.

PIMPINAN:

1. Meutya Viada Hafid (F-PG)
2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)
3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)
4. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si. (F-PD)
5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri
16. Itet Tridjajati Sumarijanto

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

17. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
18. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
19. I. Lodewijk F. Paulus
20. Nurul Arifin, M.Si.
21. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
22. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
23. Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

24. Sugiono
25. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
26. Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc.
27. Rachel Maryam Sayidina
28. Fadhlullah, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

29. Prananda Surya Paloh
30. Muhammad Farhan
31. Kresna Dewanata Phrosakh

32. Hasbi Anshory, S.E., M.M.

33. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

34. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

35. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

36. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.

37. A. Helmy Faishal Zaini

38. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

39. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

40. Rizki Aulia Rahman Natakusumah

41. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.

42. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.

43. Teuku Riefky Harsya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

44. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

45. H. Sukamta, Ph. D.

46. H. Ahmad Syaikhu

47. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

48. Ir. Alimin Abdullah

49. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.

50. Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

51. H. Syaifullah Tamiha, S.Pi., M.S.

52. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

Anggota yang ijin : 1. R. Imron Amin, S.H., M.H.

Undangan : 1. Sestama Bakamla RI, Laksamana Muda TNI S. Irawan, M.H.
beserta jajaran.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat Siang, Salam Damai Sejahtera buat kita semua.**

**Yang sangat Kami hormati teman-teman Anggota Komisi I,
Pak Sestama Bakamla, Bapak Laksamana Muda Irawan,**

S-nya apa Pak, mohon izin?

**Supriatno, Irawan, beserta seluruh jajaran,
Hadir Laksamana Pertama Enjud Darajat, Direktur Data dan Informasi, Direktur Kebijakan,
Bapak Samuel,
Direktur Perencanaan, Laksamana Pertama Pundi Rusbandi,
Direktur Hukum, Bapak Dr. Erry. Herman,
Dan Karo Sarana, Laksamana Pertama Bapak Supriatno.**

Ibu-Bapak,

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, telah hadir 6 fraksi, fisiknya 14, virtual 1 dan dengan ini rapat kerja, saya mohon ini kita setuju ya, ini rapatnya terbuka ya? Terbuka ya? Ini dengan ini rapat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)
(KETUK PALU: 1X)
(RAPAT TERBUKA UNTUK UMUM)**

Ibu-Bapak,

Sebelum Pak Sestama, Pak Irawan menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang RUU Bakamla, ada baiknya saya sedikit *me-review* bahwa teman-teman hampir di setiap pembahasan, sepakat untuk mendorong ini. Tapi lapangannya, selalu ketika kita membuat undang-undang beririsan atau potensi berbenturan dengan kepentingan atau lembaga lain, biasanya perjalanannya jauh dari mudah. Besar harapan saya, nanti ini Pak Aan dan Pak Ses memotori ini, untuk *road show*, paling *enggak* ke Pak KASAL, kemudian ke mitra-mitra terkait, termasuk Bea Cukai Laut, termasuk lembaga-lembaga yang dilapangannya berhubungan dengan Bapak.

Saya persilakan untuk Bapak menyampaikan pokok-pokok pikirannya terutama tentang RUU Bakamla yang ada dibenak teman-teman. Sejauh ini menurut catatan sekretariat, belum pernah ada, tetapi ujung-ujungnya *enggak* pernah jalan. Atau bahasa disininya, *dibantarkan*. *Dibantarkan* itu digeletaki begitu saja. Saya juga belum tahu persis, nanti kita akan tanya kepada senior-senior yang ada di Komisi I.

Silakan Pak Irawan.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih Pak.

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat Siang, Salam Sejahtera bagi kita semua.
Shalom.
Om Swastiastu.**

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat,
Yang kami hormati Bapak-Ibu Komisi I yang hadir dalam kesempatan Rapat Dengar
Pendapat hari ini,**

Suatu kebanggaan bagi Bakamla, kembali Bakamla dipanggil untuk diberikan perhatian yang luar biasa di ruangan ini, untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI. Sebagaimana TOR undangan yang kami terima, izin kami menyampaikan ruang lingkup paparan kami sebagai berikut:

Yang pertama adalah, kami akan menyampaikan tentang rencana legislasi terkait keamanan laut. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan. Yang ketiga, kami akan memberikan gambaran tentang kondisi, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bakamla. Kemudian yang keempat, kami akan menyajikan kebutuhan alokasi anggaran ideal yang diperlukan oleh Bakamla.

Berikut ini kami sampaikan *time line* atau perkembangan perjalanan dari upaya membentuk RUU Kamla. Perlu kami sampaikan, bahwa pada dasarnya RUU Kamla telah masuk ke dalam *long list* Prolegnas Tahun 2015 sampai Tahun 2019, sebagai inisiatif DPR.

Kemudian selaras dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini presiden, pada rapat terbatas tanggal 21 September 2015 mengatakan bahwa regulasi yang melandasi Bakamla saat ini, belum dapat memperkuat Bakamla. Terlebih Bakamla diharapkan menjadi *Indonesia Coast Guard*. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Pembentukan Bakamla. Tahun 2016, naskah akademik dan draft RUU telah lengkap di DPR, yang mana Bakamla bekerja sama dalam penyusunannya. Tahun 2017 tidak ada pembahasan terkait RUU Kamla, dan baru diangkat kembali pada Tahun 2018 dalam RDP. Disampaikan, DPR siap untuk mengupayakan RUU Kamla. Tahun 2019, Komisi I bersedia menginisiasi RUU dan menjadi prioritas Komisi I di Tahun 2019.

Namun, dalam Rakor Kamla antara Baleg dan Kumham, diperoleh masukan bahwa RUU Kamla baru akan dibahas setelah dilaksanakan revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada awal Tahun 2020, RUU Omnibuslaw Kamla, masuk dalam *long list* prolegnas 2020-2024, dan menjadi prioritas 2020, dengan inisiatif dari pemerintah. Ini sebenarnya telah juga menjadi kebijakan politik pemerintah, sebagaimana dinarasikan saat pelantikan Kabakamla pada bulan Februari 2020, bahwa ke depan di laut yang diberikan kewenangan adalah Bakamla. Dan regulasi akan diharmonisasi. Ini salah satu sebagai direktif presiden. Kemudian pada Juli 2020, RUU Omnibuslaw Kamla dikeluarkan dari prolegnas prioritas dan digantikan dengan RUU Landas Kontinen.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Pak, *ngapain* itu? Kalau belum bisa cepat, nanti saja. Setelah rapat, iya. Kalau *enggak* bisa cepat. Sudah beres? Beres? Ya sudah.

Silakan, terus Pak.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Kami ulangi, pada Juli 2020, RUU Omnibuslaw Kamla dikeluarkan dari prolegnas prioritas, dan digantikan dengan RUU Landas Kontinen. Hal ini disebabkan karena menurut pemerintah, RUU Omnibuslaw Kamla membutuhkan waktu.

Untuk tetap mendorong perbaikan tata kelola Kamla, maka untuk penguatan awal, pemerintah pada awal Tahun 2021 mendorong RPP Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Laut. Sedangkan RUU Omnibuslaw Kamla direncanakan pada Tahun 2020.

Izin menyampaikan urgensi RPP Tata Kelola dan RUU Kamla. RPP Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan perlu diwujudkan, karena memiliki berbagai tujuan.

Yang pertama, mengukuhkan Bakamla menjadi *Indonesian Coast Guard*. Karena selama ini di Indonesia dikenal ada 2 *coast guard*. Yaitu KPLP dan Bakamla. Jadi negara lain bingung, mo *ngundang*, bingung, bingung mau *ngundang* siapa saat ini. Kemudian juga tidak terjadi apa-apa, ada 2 pintu. Yaitu di KPLP atau di Bakamla. Nah ini mohon menjadi suatu pertimbangan betul-betul dan mendapat bantuan dari Komisi I ini, untuk dapatnya nanti digolkan, bahwa yang menjadi *coast guard*, satu institusi itu. Ini sampai sekarang belum ada.

Jadi sebagai gambaran Pak, pada saat RPP ini, ini terjadi suatu hal yang *stuck*. Jadi yang menjadi *coast guard* yang nanti ditunjuk pembahas *coast guard*, itu di *judicial review*. Jadi artinya *depending matters*. Sebagai *pending matters*. Jadi justru ini yang penting, malah dipending. Jadi ada hal yang dari *stakeholder* yang lain yang tidak setuju Bakamla menjadi *coast guard*, malah justru mengedepankan adalah KPLP sebagai *coast guard*. Sedangkan Undang-Undang 17 menurut orang-orang hukum ini, maupun yang di Polhukham, Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu, bahwa KPLP setelah tidak tahun tidak melaksanakan untuk menjadi, melaksanakan fungsi *coast guard*, ya dianggap bahwa undang-undang mengenai fungsi dan *coast guard* sebagai KPLP itu menjadi runtuh dengan sendirinya.

Kemudian yang kedua adalah membangun sistem koordinasi dan kendali patroli serta operasi keamanan dan keselamatan laut yang terintegrasi.

Ketiga, mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang tersebar di beberapa instansi terkait ke dalam satu sistem keamanan laut nasional. Sampai hari ini, sistem integrasi belum terwujud. Kemudian keempat, membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi melalui unit penegakan hukum yang merupakan representasi aparat penegak hukum di bidang kelautan.

Sedangkan RUU Omnibuslaw Kamla diperlukan guna mengharmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Jadi tidak menghilangkan kewenangan institusi, tetapi lebih kepada mengintegrasikan kewenangan patroli laut yang dimiliki instansi keamanan laut di Indonesia.

**Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat,
Komisi I yang kami hormati,**

Jadi sampai saat ini bahwa mereka, stakeholder yang lain, itu menganggap bahwa Bakamla akan mengambil alih dari fungsi tersebut. Tapi sebetulnya tidak. Jadi ini hanya mengintegrasikan semuanya. Jadi satu pintu, bahwa Bakamla lah pintunya untuk masalah keamanan di laut. Tapi sampai hari ini, dari RPP maupun RUU ini menjadi kendala yang sangat dominan. Jadi adanya ego yang sangat tinggi terhadap mereka semua itu.

Sedangkan RUU Kamla bertujuan untuk penyederhanaan birokrasi dalam suatu sistem yang terintegrasi, mengedepankan semangat kerja sama dan sinergi. Jadi, juga guna menindaklanjuti arahan presiden, di mana dalam rangka mewujudkan Bakamla sebagai Indonesia *Coast Guard*. Kemudian yang kedua, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pembentukan tata kelola pemerintahan di laut, yang efektif dan efisien. Ketiga, mewujudkan keamanan, keselamatan, perlindungan, pelestarian lingkungan laut Indonesia serta kepatuhan masyarakat pengguna laut terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, memberikan kepastian hukum guna meningkatkan kepercayaan masyarakat maritim nasional dan internasional. Yang kelima, meningkatkan iklim investasi di sektor kelautan.

Kemudian dalam konteks kebijakan dan strategi untuk penguatan kelembagaan, Bakamla telah menyusun *roadmap* kebijakan yang disusun secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam jangka pendek, yaitu setiap tahun Bakamla melaksanakan optimalisasi pada sejumlah aspek. Yang pertama adalah penguatan perundang-undangan, kemudian peningkatan kapasitas SDM, membangun kepercayaan *stakeholder* dan peningkatan kapasitas operasi khususnya pada operasi bersama. Dalam jangka menengah, sampai dengan 5 tahun, pada aspek legal dilakukan pembangunan sistem informasi maritim nasional, pelaksanaan rekrutmen mandiri, peningkatan peran *coast guard* di regional maupun global, dan pengembangan kapasitas operasi bersama. Sedangkan dalam jangka panjang, diharapkan dapat diimplementasikan tupoksi Bakamla sebagai *single agency multitask* penindakan hukum di laut, memiliki lembaga pendidikan sendiri, menjadi agen utama poros dunia, khususnya sebagai *contact person* tunggal dan pemantapan kapasitas dan kapabilitas sumber daya.

Dari *road map* yang telah kami uraikan tadi, Bakamla menetapkan kebijakan utama menciptakan tata kelola organisasi atau pemerintahan yang baik di lingkungan Bakamla, dan stakeholder maritim sebagai landasan strategi penguatan dengan tujuan atau *ends*-nya adalah kelembagaan Bakamla dan tata kelola Kamla yang kuat.

Strategi penguatan ini pada dasarnya terbagi dua bagian, yang berfokus kepada lingkup eksternal, dan lingkup internal. Dalam lingkup eksternal, untuk mencapai tujuan tadi, dilakukan dengan melalui pendekatan membangun kesepahaman dan saling percaya. Sedangkan dalam lingkup internal, dilakukan dengan membina organisasi secara menyeluruh.

Upaya untuk membangun kesepahaman dan saling percaya, dilakukan melalui inisiasi forum komunikasi. Saat ini Bakamla telah 9 kali melaksanakan rakor pengamanan maritim yang dihadiri oleh seluruh KL di laut. Jadi sampai hari ini, Bakamla menginisiasi rakor pengamanan maritim yang dipimpin oleh Bapak Ka. Bakamla, dan Alhamdulillah bisa hadir 13 stakeholders, Pak. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada keinginan mereka juga untuk siapa menjadi pemimpin ataupun ketua kelas yang ada di laut. Bakamla juga berusaha membangun kesepahaman tentang Kamla, melalui berbagai kegiatan forum dan akademis. Selain itu juga Bakamla terus mendorong upaya untuk terwujudnya pertukaran informasi secara bertahap dan Bakamla juga terus mendorong terwujudnya operasi dan latihan bersama.

Sinergitas yang menjadi tujuan dari pendekatan eksternal untuk penguatan ini dilakukan melalui 3 pendekatan strategi, yaitu pendekatan kegiatan melalui operasional dan latihan bersama, serta pertukaran informasi. Pendekatan regulasi melalui SOP atau protokol kerja sama dan melalui pendekatan manajemen pengetahuan melalui diklat bersama dari berbagai forum.

Sedangkan upaya untuk membina organisasi secara menyeluruh dilakukan dengan menetapkan sasaran yang *visible* atau layak sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, membina sumber daya manusia, dan sarana prasarana, serta menyusun strategi operasi sesuai dengan kapasitas dan terus menerapkan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pembinaan internal kelembagaan difokuskan pada strategi operasi yang disusun karena bertumpu kepada kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Bakamla memiliki tantangan yang besar, yaitu kehadiran di laut dan pengamatan maritim terus-menerus, karena asset terbatas, *share* info yang belum optimal, dan anggaran operasi terbatas. Selain itu masih ada tumpang-tindih aturan terkait kehadiran di laut dalam konteks penindakan hukum dan juga fungsi serta kewenangan yang terbatas, khususnya tidak ada kewenangan penyidikan.

Dihadapkan dengan luas wilayah, di mana terdapat wilayah-wilayah yang penting memiliki resiko tinggi seperti di Pantai Barat, dari ancaman narkoba, dan juga di Laut Natuna Utara, yang menjadi ajang konstestasi *overlapping claim* dengan Vietnam, yang ditambah dengan kehadiran *coast guard* Cina. Untuk itu Bakamla menerapkan 3 pendekatan tugas, yaitu menggelar kekuatan pada wilayah prioritas, menerapkan prinsip armada siaga, dan meningkatkan informasi *sharing* untuk membangun gambaran dan situasi taktis.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan kondisi sarana prasarana yang dimiliki Bakamla saat ini, dalam kondisi capaian sarana prasarana yang diharapkan sampai dengan tahun 2029. Saat ini Bakamla hanya memiliki 10 KL besar, yaitu 1 KL 110 meter, 3 KL 80 meter, dan 6 KL 48 meter. Bakamla juga belum memiliki sarana patroli udara, banyak dibutuhkan untuk melakukan pengamatan cara cepat dan luas, Bakamla memiliki 3 zona dan pangkalan di Batam, Manado, dan Ambon. Bakamla juga memiliki 14 SSP KKL dan diharapkan dikembangkan sampai 35 SP KL.

Untuk yang patroli udara, kami melaksanakan sewa pesawat, Pak. Satu sewa pesawat ya itupun terbatas dengan jam terbang. Nah untuk mengantisipasi itu, kami bekerja sama dengan Kogabwilhan. Kogabwilhan khususnya di wilayah Laut Natuna Utara ini, kami Kogabwilhan I, untuk, dengan TNI AU, untuk kita melaksanakan kerja sama mengenai pemantauan udara. Dan *Alhamdulillah*, mereka mendukung. Jadi TNI sangat mendukung untuk Bakamla ini. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang pernah pada waktu tidak didukung, karena itu sama-sama diperlukan, mereka juga ada kegiatan lain. Nah ini yang kita harapkan Bakamla mempunyai pesawat sendiri. Karena jujur saja, kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodam kami, sampai saat ini tidak ada *overlapping*, itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kapal-kapal Vietnam. Ya itu pantauan radar. Termasuk kapal-kapal *coast guard* Cina. Tapi begitu dilihat di dalam kasat mata, ataupun langsung dengan pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan kapal, mungkin ribuan kapal, yang ada, berada di sana. Dan ini pun diperkuat oleh keterangan waktu RDP dengan Bapak KASAL di sini atau dengan Bapak Kasal, waktu RDP Landas Kontinen. Jadi pada saat beliau menjabat Pangkogabwil I, beliau menggunakan kapal TNI AU, dan beliau langsung, bagaimana situasi di daerah *overlapping* kita dengan Vietnam.

Nah ini mohon sebagai gambaran, atau pun sebagai nantinya mohon bantuan dari yang terhormat Bapak-Bapak Komisi I ini, dan sampai saat ini pun ya, bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar, untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar, tidak ada. Jadi kita mengandalkan TNI Angkatan Laut, yang juga terbatas dalam bahan bakar. Sedangkan mereka sudah berada di situ sejak lama. Kapal-kapal Vietnam maupun kapal-kapal *coast guard* Cina. Dan ini ada berita terbaru, bahwa kurang lebih jarak 50 *nautical mile* dari Natuna, itu sudah ada kapal induk Amerika di sana, dan mendekati kapal *survey* Cina. Dan kapal *survey* Cina, kapal *coast guard* Cina pun masih mengganggu atau membayang-bayangi dari pembuatan ataupun apa, kerja daripada *Reg Noble*, yang bendera Indonesia, di bawah ESDM. Nah ini kita harus waspada bersama. Makanya dari ini, RDP ini, mudah-mudahan ada suatu keputusan atau pun jalan keluar, bantuan yang sangat dari Komisi I ini, untuk kedaulatan kita, tidak bisa dijajah oleh mereka itu.

Bakamla juga mempunyai, memiliki Puskodal dan IMIC, yang saat ini masih terbatas kondisinya. Karena sistem informasi masih bersifat mandiri, belum terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Jadi artinya kita memberikan *sharing* info itu masih terbatas hal-hal yang khusus saja, jadi tidak otomatis langsung menggunakan suatu peralatan-peralatan sesuai yang kita harapkan. Gambaran sistem informasi dibangun berdasarkan informasi-informasi yang luas sumbernya. Integrasi sistem informasi baik menggunakan peralatan maupun pelaksanaan prosedur, ... personil, merupakan suatu penyelesaian atau keharusan. Sampai saat ini di Puskodal Bakamla, walauun sudah ada undang-undangnya, seharusnya di situ ada stakeholder yang lain yang berada di situ. Tapi saat ini mereka belum mengirimkan perwakilan-perwakilannya di Puskodal Bakamla. Mohon maaf.

Kemudian lanjut ke kebutuhan alokasi anggaran ideal. Adapun tahun 2022 ini Bakamla RI hanya mendapat dukungan anggaran sebesar 423,6 miliar atau hanya sebesar 9,78% dari pengajuan anggaran sebesar 4,3 triliun. Dari dukungan anggaran sebesar 423,6 miliar tersebut,

maka terdapat sejumlah kegiatan prioritas Bakamla yang belum terdukung, yaitu pembangunan dermaga, pengadaan pesawat udara, dan kapal patroli, serta anggaran operasi Kamla sendiri.

Dari kondisi tidak terpenuhinya dukungan anggaran yang berdampak pada operasi Kamla yaitu, yang pertama, tidak efektif dan efisien pelaksanaan operasi Kamla, karena ada kemungkinan penumpukan kapal patroli di suatu wilayah, dan kekosongan di wilayah lain. Walaupun kita sudah berkoordinasi secara maksimal. Kedua, terganggunya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, karena ketidakhadiran aparat, sehingga tidak dapat mencegah kehadiran kapal pemerintah atau kapal-kapal ikan asing. Kemudian ketiga, meningkatnya pelanggaran di laut. Karena menurunnya deterren. Karena ketidakhadiran aparat penegak hukum. Keempat, terancamnya kedaulatan NKRI karena ketidakhadiran kapal patroli dalam pengawasan kegiatan, dan aktivitas laut yang berpotensi melanggar kedaulatan dan juga hak berdaulat.

Sebelum mengakhiri paparan ini, dapat kami sampaikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- Yang pertama, Bakamla mendukung RUU Kamla untuk dapat masuk dalam Prolegnas 2022 dan saat ini tengah menyusun RPP Tata Kelola Kamla.
- Kedua, meski terbatas, Bakamla menyusun kebijakan dan strategi sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang terukur.
- Ketiga, Bakamla membutuhkan peningkatkan belanja modal, untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana penegakan hukum di laut.
- Dan terakhir, Bakamla membutuhkan penemuan kebutuhan anggaran operasi, dalam rangka menghadapi dinamika situasi di LCS. Sekali lagi, situasi di LCS ataupun Laut Natuna Utara, saat ini belum bisa dihadapi oleh kapal perang dulu. Karena mereka pun belum menggunakan kapal perang. Mereka hanya menggunakan kapal *coast guard*. Jadi seharusnya kita pun dihadapkan pada kapal *coast guard* sendiri. Jadi tidak menaikkan konstelasi. Tapi jika nanti kapal perang yang maju, akan lain konstelasi di daerah tersebut.

Demikian paparan ini, selanjutnya mohon arahan dan tanggapan dari yang terhormat seluruh Komisi I DPR RI, semoga menjadi perbaikan bagi Bakamla khususnya bagi Kamla kita, untuk negara yang kita cintai ini.

Sekian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Sestama.

Supaya kita juga sama-sama pahami, banyak singkatan. Ke depan, kalau ada singkatan, dipanjangi dulu baru disingkat. SP KKL yaitu Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut, IMIC – Indonesia Maritim Information Center, kemudian KPLP itu Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Jadi kalau diskusi jadi Bapak tahu, sini juga tahu, jangan Bapak tahu, kita enggak tahu. Itu namanya mata satu di negara Butaran. Idealnya itu, sama. Ini kenapa saya jelasin, supaya kita sama-sama paham.

Ibu-Bapak,

Bersama kita ikut rapat, ini mohon izin, ada 15 mahasiswa melalui virtual, karena ini rapat terbuka, tentu kita izinkan. Biar teman-teman, adik-adik, juga tambah pintar, dan adik-adik juga paham bagaimana diskusi di DPR RI yang sangat demokratis ini.

Dari meja pimpinan sudah dapat 5 penanya, mungkin akan tambah. Kita mulai biasanya dari kanan ke kiri. Tapi kalau potong bebek angsa, sorong ke kiri, sorong ke kanan, jadi dari kiri dulu ya Pak? Dari kiri dulu, Pak Sturman Panjaitan. Siap-siap Jenderal Lodewijk Paulus.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan yang luar biasa.

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian.
Om swastiastu.**

Yang Kami hormati Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Baleg yang luar biasa, baik yang langsung fisik mau pun yang virtual.

Eh kok Baleg, sih? Sorry maaf, salah,

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Ini berarti Omnibusnya enak. Masih teringat-ingat.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Sorry.

Baru rapat dengan Komisi VII tadi Pak, di Baleg, *sorry*. Komisi I yang luar biasa, ...

**Pak Sestama dan jajaran yang luar biasa,
Dan mahasiswa yang hadir mungkin secara virtual karena disampaikan tadi Pimpinan tadi.**

Pertama-tama saya ingin mengatakan, saya sedikit mem-*filter* apa yang dikatakan Pimpinan tadi, tentang Undang-Undang Tentang Kamla ini. Undang-Undang Kamla kan sudah masuk di dalam *long list* prolegnas 2019-2024. Dan prolegnas prioritas 2019-2020, dia juga masuk, sebenarnya. Dan itu pengusulnya adalah pemerintah. Kemudian pemerintah mengubah ini, dimasukkanlah Undang-Undang tentang Landas Kontinen, RUU Landas Kontinen. Artinya, suka tidak suka, pemerintah mengatakan bahwa ternyata Undang-Undang Kamla ini belum terlalu penting dibahas.

Nah, tadi Pimpinan mengatakan ada irisannya, malah. Banyak sekali kepentingan di sini, Pak, Pak Sestama dan Tim. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meyakinkan pemerintah dan seluruh *stakeholder* agar mereka pun tidak keberatan atau tidak mengganggu, atau bahkan mendukung apa yang disampaikan oleh Kamla ini. Karena terlalu banyak *stakeholder* yang terpengaruh, yang ada Bapak katakan tadi, sudah demikian banyaknya. Sehingga kalau kami di DPR RI, begitu pemerintah mengajukan, kita langsung bahas di sini, enggak ada masalah. Ini, Pak Sestama dan Tim, dan sampaikan kepada Ka. Bakamla, untuk melihat ini melobby, lah, karena di DPR ini enggak ada yang benar-salah, yang ada sepakat atau tidak sepakat, sebenarnya. Itu saja perlu kita bahas. Karena kalau saya melihat, dengan Angkatan Laut saja, mudah-mudahan Bapak sudah selesai. Apalagi dengan institusi lain diluar yang Angkatan Laut, misalnya. Itu belum banyak, Pak. Ini memang akan panjang, dan lama prosesnya nanti. Kalau ini sudah bisa diselesaikan, karena ini pengusulnya pemerintah, kecuali nanti DPR merubah pikiran, dengan alasan tertentu akan pengusulnya nanti adalah DPR RI. Itu bisa saja terjadi. Karena bisa saja oleh pemerintah, DPR baik perorangan maupun sebagai badan. Jadi kalau untuk yang itu mungkin perlu ada pembahasan khusus Pak, karena enggak mudah memang, untuk bisa menyelesaikan secara tuntas.

Yang kedua, saya mau sedikit bahas tentang menjadi pokok, tentang anggaran. Anggaran ini Pak, tidak ada satupun, mungkin Pak Sestama melihat sendiri bagaimana kita rapat. Semua yang diusulkan oleh Bakamla itu, selama itu masuk dalam cara pandang legislasi kita, atau DPR ini, maka pasti ada hukum. Enggak ada masalah, Pak. Karena memang kalau kita lihat tugas-tugas dari Kamla ini memang cukup banyak, dan cukup bersinggungan dengan hal-hal, dengan badan lain, sehingga perlu memang *support* ini luar biasa, Pak. Kalau saya mengatakan, kalau anggaran enggak ada masalah dengan kita. Pada umumnya Komisi I itu mendukung dengan sangat, apa yang dibutuhkan.

Yang berikutnya, kalau Bapak tentang masalah tugas, tanggung jawab, semua ada kesinambungannya, semua adalah khususnya dengan Angkatan Laut. Cuma memang Angkatan Laut ini lebih pada penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Tetapi itupun bersinggungan. Tentang keamanan laut, juga pasti bersinggungan.

Ini mungkin yang kita perlu samakan persepsi, Bapak Sestama.

Sedangkan untuk yang tentang kebutuhan anggaran dan operasional, saran kami, silakan saja ditulis, mana yang perlu ditambahkan. Toh tidak ada yang tidak didukung oleh Komisi I, apabila itu memang dibutuhkan untuk tugas-tugas Kamla.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam.

Pak Letnan Jenderal yang juga Sekjen, Pak Lodewijk Paulus. Siap-siap Pak TB.

F-PG (I LODEWIJK F. PAULUS):

Terima kasih Pimpinan Rapat.

**Yang Saya hormati Pimpinan Komisi I,
Anggota Komisi I,
Sestama Bakamla dan jajarannya,**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dari saya ada hal yang sebenarnya keluar dulu sedikit, yaitu tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan Laut. Bahwa kita tahu tentang kelautan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Di mana setahu saya ini, Bakamla sudah dua kali rapat dengan Kemenkopolkukham, membahas ini. Dan dua-duanya belum berhasil, atau dikatakan *deadlock*.

Nah yang menarik di sini, ya, dalam Undang-Undang Nomor 32 itu ya, yang dikatakan mengatur tata kelola dan kelembagaan laut. Dan setelah dalam peraturan pemerintah yang sedang dirancang ini, berubah menjadi Tata Kelola Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Nah tentunya ini ada sedikit penyimpangan, ya, terkait dengan, maaf, terkait dengan rencana undang-undang ini, ya. Nah tentunya saya ingin tanyakan, apa korelasi antara Rancangan Peraturan Pemerintah yang dikatakan menyimpang tadi, terkait dengan rencana Undang-Undang Keamanan Laut, ya. Kemudian tentunya dari Bakamla dalam menyusun RUU Kamla ini, pasti ada korelasinya dengan Undang-Undang 32. Nah pandangan dari Sestama dalam hal penyusunan Undang-Undang Kamla ini seperti apa. Itu yang pertama.

Kedua, terkait dengan Undang-Undang Maritim yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Cina, yang pertama sempat kita bahas di ruangan ini, yang melegalkan untuk *coast guard*-nya, menembak dengan menggunakan alutsista yang ada di kapal itu, artinya menembak kapal, ya. Kemudian diamandemen, tambah lagi, ternyata. Bahwa dikatakan seluruh kapal yang melintas Laut Cina Selatan, itu wajib lapor kepada *Coast Guard* Cina. Nah tentunya kalau dikatakan Laut Cina Selatan, Indonesia kan ada terlibat di situ, karena *nine dash line* ini, itu masuk yang diklaim oleh mereka. Nah, pandangan dari Bakamla terkait dengan Undang-Undang Maritim Cina yang sudah diamandemen, tambah lagi kekuatannya, tambah lagi kewenangannya ini, seperti apa?

Terus yang, tentunya yang ketiga, tentang alutsista yang dimiliki oleh Bakamla ya, di sini memang dari segi anggaran masih sangat kecil. Tapi mudah-mudahan ini kita kejar terus, agar ada penambahan ya. Karena yang ingin juga saya tanyakan, ada korelasinya dengan tadi, yang undang-undang, Amandemen Undang-Undang Maritim Cina tentang boleh menembak kapal. Termasuk tentunya kapal-kapal dari *coast guard* atau Bakamlanya sendiri, ya. Bakamla RI, maksud saya. Nah bagaimana Bakamla menyikapi ini? Terus padahal kemarin kan kalau enggak salah, apa beberapa waktu lalu, Bakamla diizinkan oleh Kementerian Pertahanan untuk boleh memegang senjata. Tapi itu kan hanya apa namanya, senjata SMB kaliber 12,7 dan senjata-senjata perorangan kaliber 5,56. Nah terkait itu, bagaimana Bakamla menyikapi itu, dan apakah RUU ini ya, sudah mengadopsi bagaimana menghadapi Undang-Undang Maritim Cina yang demikian katakan leluasa bertindak, dihadapkan dengan kondisi Indonesia.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Waalaiikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak TB Hasanudin, siap-siap wanita yang 31 tahun lalu menggemparkan republik, Ibu Nurul Arifin.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan yang Saya hormati dan juga rekan kami dari Bakamla.

Saya mungkin tidak bertanya, tapi saya ingin menjelaskan ya, sepengetahuan saya. Dan ikut saya sebagai pimpinan komisi waktu itu, dalam rapat-rapat di Menko Polhukam dan lain sebagainya tentang Bakamla ini. Saat itu, Tahun 2014-15, dalam rapat di Kementerian Menko Polhukam, itu dipaparkan bahwa dalam 20 tahun terakhir. Jadi mungkin sekitar tahun-tahun 2000-an sampai tahun saat itu, ya, semua jenis pelanggaran, mayoritas itu lewat laut. Karena memang, kita zonanya zona laut. Kita memang negara maritim. Mulai dari, kalau dulu narkoba tidak lewat laut, sekarang lewat laut. Penyelundupan barang-barang lewat laut, penyelundupan manusia lewat laut, makin tertibnya di bandara, skrining dan lain sebagainya, maka kemungkinan lewat udara itu sangat kecil. Semua kegiatan termasuk penyelundupan manusia sekalipun senjata dan sebaliknya pemberontakan sekalipun dan lain sebagainya, itu hanya bisa lewat laut. Sehingga waktu itu negara yang masih dipimpin waktu itu oleh Bapak Jokowi, membuat sebuah kesimpulan, bahwa kita perlu melakukan pengamanan dengan berbagai cara, seperti apapun, ya, di laut.

Saya mohon ini tertutup ya, karena nanti saya akan menyangkut banyak hal, *nih*. Termasuk juga, ya, ya saya mohon tertutup *nih*.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Mohon yang *virtual* dipendot dulu, atau diputus, nanti disambung lagi. Pemain yang pengalaman, suka interupsi. Yang di atas, pendot dulu, nanti, yang di atas, tolong keluar dulu.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Ya andaikan nanti ada kata-kata saya, saya nyatakan bahwa ini tidak

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Permintaan anggota kita penuhi, karena beliau adalah mewakili sekian ratus ribu rakyat.

Silakan Pak TB.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Baik.

Kemudian terjadi perdebatan-perdebatan, dan kalau saya lihat, memang nyata, bahwa kepentingan di laut itu, banyak. Bahkan Kementerian Pendidikan pun punya juga peran di laut. Saya juga bingung, apa itu? Perpustakaan Nasional itu juga ternyata ada di laut. Kemudian perdagangan, ada di laut. Kemudian juga Menteri Kelautan juga ada di sana, bahkan waktu itu saya masih ingat, masih menterinya Pak Romin Dahuri, itu membentuk pasukan. Nah, itu, bersenjata, dengan berseragam. Itu di bawah Menteri Kelautan. Nah lalu ditertibkanlah bahwa semua sepakat, ya, semua sepakat, bahwa penegakan hukum di laut itu tidak bisa dengan menggunakan Angkatan Laut. *Army force, navy, enggak* bisa. Karena pada suatu saat, kita sebagai negara maritim akan berhadapan, *head to head* dengan negara-negara tetangga yang juga memiliki laut. Nah lalu berpikiranlah kita harus memiliki, punya ya, *coast guard* itu. Disitulah istilah *coast guard* itu. Tapi setelah dibuka, timbul perdebatan. Bahwa sebetulnya yang harus jadi *coast guard* itu adalah KPLP ya? Begitu. Padahal waktu itu sudah disepakati, di laut, ya sudah, kita

coast guard. Nah penegakan hukum sipil, nah begitu. Lalu di wilayah perbatasan laut dengan pantai, territorial, ada Pol Airud, di situ. Lalu ada KPLP dan lain sebagainya. Ya sudah, di sana. Tapi untuk ke laut, ya, itu harus punya *coast guard*. Nah dari situ, timbul lagi perdebatan, *coast guard* itu mau siapa? Nah kemudian presiden mengambil jalan tengah. Dulu ada namanya Bakorkamla. Nah dikeluarkanlah Kepres itu, ya, menjadi Bakamla. Di bawah langsung presiden. Tapi untuk sementara, dikoordinir oleh Menko Polhukam. Saya masih ingat, waktu itu Menko Polhukamnya masih Pak Luhut, ya Pak LBP.

Jadi kalau menurut hemat saya, ya, ada banyak hambatan. Satu, yaitu hambatannya adalah mereka yang punya kepentingan di laut, itu satu. Termasuk juga mohon maaf dengan segala hormat, Angkatan Laut juga, ya. Terutama dari mantan-mantan gugus tugas yang biasa patroli di laut. Lho kok bisa? Ya lah, tanyalah sama perwira-perwira pelaut lah, jangan tanya sama mariner lah, ya Pak ya? Tapi tanyanya sama perwira laut, yang memang suka patroli di laut lah, begitu. Saya tahu persis lah ya, begitu.

Nah kemudian juga mohon maaf, ada perwira-perwira Angkatan Laut mantan yang dengan keras juga menentang *coast guard* ini ya, Bakamla ini, menjadi *coast guard*. Itu juga harus menjadi pemikiran kita semua. Saya sejak zaman siapa, sudah meminta ini diselesaikan. Dan sesungguhnya, tahun 2016 itu sudah siap maju untuk dibahas di DPR. Tetapi ada angin ribut, wah, di Bakamla itu. Lalu sampai beberapa orang termasuk ya para pejabatnya ditangkap, dan lain sebagainya. Akhirnya itu tenggelam. Sebetulnya sampai era itu, ya, yang namanya RUU Keamanan Laut, *enggak* ada masalah. Wong sudah di Komisi, kok. Sudah siap dibentuk. Panja saja, begitu ya. Dan waktu itu ya, Balegnya belum seribet sekarang. Mohon maaf. Kalau sekarang ini kan Baleg juga bukan hanya untuk sinkronisasi, Baleg itu juga masuk ke substansi. Ya saya mohon dengan segala hormat, ini juga menjadi pemikiran kita semua, ya, mengapa itu yang namanya undang-undang kita, Komisi I, yang membuat dan lain sebagainya, Undang-Undang Penyiaran, tak pernah selesai. Undang-Undang Penyiaran saja sudah selesai, semua di sini fraksi, tanda tangan, semua sudah ketok palu, sudah selesai. Tapi dibawa ke Baleg, di Balegnya, ya hahahahe, begitu. Padahal sama fraksinya, fraksi A sampai Z, sama. Itu. Jadi lain, PDI di Komisi I dengan PDI-PDI Baleg, beda. *Lho gimana*, saya bilang. Aduh. Jadi saya bilang, *so what gitu loh*. Ya saya ini *ngomong* apa adanya saja. Sehingga kalau menurut hemat saya, kembali lagi, niat pemerintah, niat negara itu punya *coast guard*, harus kita wujudkan ini. Untuk kepentingan ke depan, ya, begitu. Dan tentu saya senang kalau itu inisiatif dari pemerintah. Pemerintah juga nanti harus satu suara. Saya punya juga, Undang-Undang Kamnas. Ayo, kita sudah setuju dibahas, di panja sini, di Komisi I. Ternyata pemerintah menjadi 5 grup, 5 versi, Undang-Undang Kamnas. Saya ketok, tidak jadilah, sudah selesai, saya bilang. Karena apa? Ada versi polisi, disitu pemerintahan duduk. Ada versi TNI, ada versi Lemhanas, ada versi Staf Presiden, ada versi Wantanas. Lima, di situ. Jadi ketika membahas satu pasal saja, DIM Nomor 1, di situ, ramai saja lima itu. Kami ya *melongo* saja. Besok, jangan boleh terjadi. Begitu nanti kita membahas DIM yang namanya DIM Undang-Undang Kelautan, ada versi Bakamla, versi Angkatan Laut, lalu versi KPPL, versi Undang-Undang Kelautan, ada versinya Pak Ponto, mungkin. Itu seniornya Pak, nah begitu. Sehingga nanti, saya mohon dikompakkan, begitu, ya.

Menurut hemat kami, ini harus mendapatkan perhatian Pimpinan, karena laut ini kan, kita ini jujur, ya. Saya membaca ternyata ya, Sriwijaya, Majapahit, itu negara maritim. Iya, negara maritim. Ya, begitu. Sesudah ke sini, ke sini, nah itu, di era Orde Baru, malah kita menjadi kembali negara apa, pulau, mungkin, daratan. Saya hanya melihat dari betapa orientasinya itu ke darat itu ya, maksud saya, saya sebagai mantan prajurit TNI Angkatan Darat ya ke satuan territorial lah, ya. Angkatan Laut itu ya sudahlah, begitu, nanti saja, perangnya nanti di mana lah, begitu ya. Mungkin seperti itu. Sehingga saya, walaupun saya mantan prajurit Angkatan Darat, saya siap mendukung. Karena orientasi kita adalah ke laut, kalau menurut hemat saya. Sehingga kita harus lengkap, di sana itu. Jepang itu, pasukan Angkatan Laut keduanya itu ya *coast guard*-nya itu. Jepang itu. Amerika, juga begitu. Memiliki senjatanya. Meriam, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini mungkin harus menjadi perhatian kita semua, Pimpinan. Jadi sudah 7 tahun sebetulnya, cita-cita ini. Sudah lima Kepala Bakamla, itu, tidak pernah selesai. Ya, jadi saya pribadi mendukung begitu, dan mungkin tidak usah Pansus, cukup dengan Panja saja. Dari kita, selesaikanlah. Komisi I itu pernah menyelesaikan undang-undang hanya dalam waktu 2 bulan. Dua bulan saja, Pimpinan. Ya. Begitu. Ini prestasi. Dan mungkin pada suatu saat kita harus bisa, Undang-Undang Veteran, nah, Undang-Undang juga ITE, itu yang ramai dan sebagainya, hanya dalam waktu 2 bulan kita bisa selesaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin yang memberikan *background story*. Setiap *background* mesti kita pahami dengan baik, Pak Ses. Bahwa setiap irisan, setiap *cross, cutting*, penyelesaiannya bukan teknis. Wilayah optimasi penyelesaiannya biasanya kompromi antar para petinggi republik. Ini pesan dari Pak TB, yang baru saja merayakan ulang tahun. Beliau merayakan ulang tahun yang pasti Pak Rizki mengenang umurnya, umurnya 69. Angka itu angka keramat, untuk hal-hal tertentu.

Saya persilakan, oh mbak siapa, mbak Nurul barusan pamit, ada *commander call*. Kalau di politik juga ada *commander call*, yang harus serta-merta menghadap juragan. Di politik, ada juragannya, Bapak juga ada juragannya. Jadi kalau kita *ngomong* ini, anjing menggonggong, ada yang punya, Pak. Jadi semua *enggak* berdiri sendiri.

Saya persilakan Mbak Nurul yang tahun '88 menggetarkan republik, enggak ada, Pak Lodewijk, Pak Rizki Aulia. Silakan, Pak Rizki.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih Pak Ketua.

Agak bingung sebenarnya Pak Sestama, karena tadi poin-poinnya sebenarnya sudah ditanyakan, terkait dengan hal-hal penting yang tadi dari Pak Jenderal Lodewijk, Pak Jenderal Sturman, dan Pak Jenderal TB Hasanuddin. Tapi saya ingin menggarisbawahi,

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Beliau ini cucu saya, lho Pak.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Cucu, Pak. Kakek saya sebelas dua belas tapi pangkatnya jauh lebih, lebih luar biasa beliau. Kalau kakek saya, jawara saja, Pak. Kalau beliau benar ada bintangnya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Saya bersahabat, berteman, main dengan kakeknya.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Ya.

Saya ingin menyampaikan, setelah dilantik, saya 2019 silam Pak, itu saya semangat sekali., terkait dengan keamanan laut. Karena presiden mempunyai visi terkait dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, katanya. Tapi kita makin ke sini, kita dengar, sudah tenggelam, kayaknya, visi dari Pak Presiden untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia ini. Jadi mungkin itu berdampak atau tercerminkan dalam komitmen dari negara dalam mengamankan atau membuat satu sistem di mana keamanan laut dari negara kita bisa terjaga. Tapi tadi pertanyaan dari Pak Jenderal Lodewijk sebenarnya menjadi sorotan dari saya, Pak. Terkait dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah dalam Tata Kelola Keamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan. Ini kalau kita soroti, undang-undangnya sebenarnya mengamanatkan bahwa untuk bisa diselesaikan dalam, selama-lamanya, dan *dead line*-nya adalah 3 tahun. Tapi sampai saat ini mungkin terjadi *deadlock* dan lain sebagainya, saya mohon klarifikasi sama Pak Sestama, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan, sehingga rancangan peraturan pemerintah ini belum bisa diselesaikan. Dan kalau misalnya itu keluar, apakah ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang sebelumnya? Menjadi acuan dari kita semua. Itu pertanyaan pertama, Pak.

Kedua, terkait dengan, tadi sudah diulas sebenarnya oleh Pak Jenderal Sturman dan para penanya sebelumnya, terkait dengan adanya revisi Undang-Undang Landas Kontinen. Nah ini tentu kan kalau saya yakin di negara ini, Pak TB Hasanuddin, Jenderal TB, kebetulan beliau adalah pimpinannya di situ. Kalau di dalam level negara, saya yakin ini diselesaikannya, diratifikasinya cepat, Pak. Tapi nanti urusan di dunia, pengakuan dari PBB, dan lain sebagainya, itu sudah ranahnya lain lagi. Tapi yang menjadi sorotan saya, apakah Bakamla optimis, terkait dengan penambahan beban tugas yang luar biasa dalam mengamankan dan menjaga apa, ketegakan

hukum di wilayah perairan yang nantinya kita akan tambah tersebut, Pak. Dan kalau misalnya belum, pertanyaan saya, apakah anggaran untuk tahun anggaran 2022 usulan dari Bakamla, sudah mengarah ke arah sana? Sudah berorientasi ke sana? Kita dengar tahun lalu, *sea glider* saja kita masih kesulitan betul, dalam mendeteksinya. Termasuk ini masalah dari keamanan apa, dari TNI Angkatan Laut juga.

Jadi pertanyaan saya ke Pak Sestama, terkait dengan teknologi, kita hidup di dalam dunia di mana ada perkembangan teknologi yang super cepat, dan Bakamla juga sudah menyatakan bahwa kita mendeteksi *sea glider* saja belum mampu, terakhir kemarin, apakah sudah menuju orientasinya ke sana, dalam tahun anggaran 2022 nanti? Tadi Bapak menyatakan, ini ada pesawat yang diharapkan nantinya apa, bisa dimiliki oleh Bakamla. Nah tapi kan kita juga tahu, kue ekonomi kita *enggak* sebesar itu yang bisa apa, mendanai semua kebutuhan dari setiap badan ataupun lembaga ataupun kementerian, Pak. Jadi apakah tidak sebaiknya diarahkan ke permasalahan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, seperti mendeteksi alat apa namanya, *unmanned underwater vehicles* seperti *sea glider* yang kemarin kita sulit untuk mendeteksinya.

Nah terakhir Pak Ketua, mohon izin. Jadi kalau sebelumnya dulu ada, saya bukan fans beliau, Pak, tapi yang beliau lakukan sebenarnya, esensinya adalah memberikan efek gentar. Ibu Susi, waktu itu. Menenggelamkan kapal dari Tiongkok, kalau tidak salah. Ini kan sebenarnya, saya ingin tanya ke Bapak, apakah bisa dilakukan *effort* ataupun upaya-upaya seperti ini lho, Bakamla, untuk bisa menciptakan citra kepada publik dan memberikan efek gentar kepada negara-negara yang mengaku sahabat tapi suka masuk ke wilayah kita, dan lain sebagainya. Ini apakah bisa dilakukan oleh Bakamla? Karena selama ini kita harus jujur, Bakamla citranya di mata dari masyarakat Indonesia tentu masih dalam tanda tanya, Pak. Nah ini tentu kita perlu dorong, tadi para senior sudah mengatakan, apapun yang bisa kita bantu, tentu kita bantu, Pak. Karena kita mempunyai komitmen yang jelas untuk membangun kekuatan keamanan laut kita. Tapi efek gentar atau apa namanya, upaya-upaya untuk memberikan efek gentar kepada musuh, bukan musuh, apa ya Pak ya, negara-negara samping kita ini yang suka jahil, kadang-kadang, ini penting sekali untuk bisa dilakukan. Ada yang bilang, *gimana* mau kasih efek gentar, kita, alutsista dan lain sebagainya saja belum punya. Tapi adakah inovasi yang bisa dilakukan oleh Bakamla, yang tidak memerlukan anggaran yang terlalu berlebihan, yang bisa menjadikan satu taktik atau pun strategi untuk memberikan efek gentar ke negara-negara samping.

Mungkin itu Pak Ketua, pertanyaannya. Mungkin agak mirip tapi Insya Allah bisa terjawab dan tersampaikan dengan baik.

Terima kasih Pak Ketua Utut, yang saya hormati.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Baik Pak Rizki.

Ibu-Bapak,

Mohon kita biasakan kita menjawab, bertanya, sepuas-puasnya, karena saudara-saudara terpilih oleh rakyat langsung, dan rakyat menitikkan aspirasi. Jadi kita biasain kita *dedicated to excellence*, jadi kalau Bapak sudah ke DPR, jangan janji sama siapapun. Jadi kalau teman-teman bertanya itu bagian dari *dedicated to excellence*. Saya saja biasanya jam segini ada ketemu mbak ini, mbak itu, kalau rapat di sini, saya *enggak* janji apapun ya. Jadi pertanyaan itu harus diterima, bagian dari *dedicated to excellence*.

Berikutnya Pak Muhammad Farhan, mohon Pak Muhammad Farhan serius, karena Pak Prananda Surya Paloh ikut rapat. Silakan.

F-NASDEM (MUHAMMAD FARHAN):

Siap, terima kasih sudah diingatkan, Pimpinan.

**Anggota Komisi I yang terhormat,
Juga seluruh jajaran dari Bakamla,**

Perlu diketahui bahwa komitmen kita mendukung Bakamla ini sudah 150%. Kita bahkan sangat apresiasi karena Bakamla sudah melakukan pembenahan untuk laporan keuangan sampai

mendapatkan WTP. Tapi memang kita masih perlu waktu untuk mendorong agar Bakamla mendapatkan penganggaran yang paling tidak kembali ke tahun 2016, 2017, begitu. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa komitmen dukungan politik ini wujudnya harus dalam bentuk komitmen dukungan terhadap penganggaran. Itu satu.

Yang kedua, mengenai dukungan terhadap legislasi, tentu saja kita perlu diyakinkan lagi tentang produk legislasi apa yang bisa kita dorong. Karena bahwa kita sekarang sedang punya Pansus Landas Kontinen. Apakah Pansus Landas Kontinen ini bisa membantu kita untuk membuat sebuah produk legislasi lanjutan yang akan memperkuat Bakamla. Apakah ada *road map* legislasinya ke arah sana? Nah kita perlu tahu strategi dari Bakamla itu seperti apa. Karena kita, jangan sampai Pansus Landas Kontinen ini malah justru tidak memberikan dukungan yang cukup kepada Bakamla, bukan karena *enggak* mendukung, tapi karena *enggak ngobrol, gitu lho* Pak. Itu yang kedua.

Yang ketiga, tentunya adalah sebuah strategi besar ini mesti diterapkan dalam hal hubungan dengan lembaga dan kementerian lain. KPLP tentu salah satu yang paling berpotensi untuk bisa dirangkul oleh Bakamla. Karena sudah jelas, namanya saja sudah kesatuan pengamanan. Jadi saya kira, kita pun semua di seluruh Indonesia ini, harus memiliki pengertian yang *clear*, tentang pemisahan antara KPLP dengan Bakamla ini apa. Ataukah memang perlu diintegrasikan? Karena kalau lembaga diintegrasikan, maka kita akan bicara banyak hal termasuk diantaranya memperhatikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Kan dari namanya saja kita sudah melihat adanya sebuah *overlapping* yang luar biasa ya, Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai, Badan Keamanan Laut. Lalu apakah dua lembaga mengamankan yang sama? Itu kan menjadi narasi yang sangat penting.

Nah tiga hal itulah yang perlu kita *clear*-kan, *gitu*. Paling tidak berharap kita ada di, apa, *at the same page*, sehingga kita bisa memberikan dorongan yang luar biasa kepada Bakamla, baik dalam masalah anggaran, masalah legislasi, juga masalah kelembagaan. Kira-kira kelembagaan itu akan menyangkut kewenangan nantinya.

Kira-kira begitu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Terima kasih Pak Farhan.

Dari catatan, semua sudah bertanya, Pak HBK, silakan.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin memberikan dorongan saja kepada Bakamla, untuk terus melakukan upaya-upaya lobby, khususnya kepada pimpinan yang dalam hal ini Pak Presiden yang sekarang ini di apa, diserahkan kepada Menko Polhukam. Yakinlah kalau kami dari Komisi I tentu saja akan semaksimal mungkin memberikan dorongan dalam segala hal, ya. Jadi saya kira di situ, apa, salah satu jalan keluar yang mungkin bisa sama-sama kita sinergikan nanti di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Baik Ibu-Bapak,

Oh ya, tadinya sudah mau selesai. DR. Sukamta, orang pintarnya PKS, mau bertanya. Silakan.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D):

Terima kasih Pak Ketua.

Tadi sebetulnya sudah daftar, tapi mungkin daftarnya belum sampai Pak Ketua, ini.

Jadi Pak Sestama Bakamla dan seluruh jajaran yang hadir,

Rekan-rekan Anggota Komisi I, yang langsung hadir maupun yang online, yang kami hormati,

Kita semua semangatnya sejak Bakamla dibentuk Pak, di Komisi I ini mendukung penuh Bakamla, sebetulnya. Karena di Komisi I ini kita semua memahami urgensi Bakamla. Bahwa Bakamla ini harus kuat, Bakamla ini harus menggetarkan, bahwa Bakamla ini harus bisa menjadi koordinator urusan keamanan laut, ini sebetulnya sejak awal kita sudah menyadari itu dan Komisi I sepanjang saya jadi DPR di Komisi I terus, itu semangatnya adalah semangat untuk memberikan dorongan agar Bakamla ini menguat. Tidak pernah ada dari Komisi I ini yang bersuara supaya anggarannya dikurangi, bahkan kita dorong terus supaya ditambahkan.

Nah begitu pula soal penguatan peraturan perundangan, kita juga terus memberikan *support*. Kan Jenderal TBH itu saya ingat, sejak dulu mendorong kita supaya Undang-Undang Bakamla ini terus segera diselesaikan. Jadi kalau urusan komitmen Komisi I, saya menjadi saksinya, Pak. Nah persoalannya memang saya lihat, seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman pembicara terdahulu, yang berkepentingan mengurus laut ini sangat banyak Pak. Dan saya kira masing-masing kepentingan itu punya pawangnya sendiri-sendiri. Nah kalau urusan berhubungan dengan pawang, ahlinya ini Pak Ketua Utut, Pak. Jadi Pak Sestama, perlu mungkin sowan kepada Pak Utut ini untuk *gimana* caranya supaya menjinakkan pawang-pawang itu. Kalau perlu nanti kasih sajen apa, ya, itu tergantung pawangnya siapa, sajennya apa, ada yang suka menyan, ada yang rokok klobot,

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Jangan lupa bawa cerutu.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D):

Nah, ada yang cerutu, *gitu* kan? Nah saya kira di republik ini, itu yang terjadi Pak. Bapak-Bapak saya kira pengalaman luas lah. Di masyarakat, ketika ada persoalan, kalau pawangnya belum dipegang, ya *enggak* akan selesai. Nah apalagi di republik ini. Sama saja Pak. Kita mau punya, mau bahas undang-undang, mau naikkan anggaran, mau, kalau semua yang berkepentingan ini belum memberikan persetujuan, ya pasti mentok sana-mentok sini, Pak. Jadi nasibnya Bakamla ini agak mirip-mirip dengan BSSN lah. Kita tahu persis urgensinya. Tapi kita ini yang tidak *ngerti* adalah ini maunya para pawang ini apa, dengan lembaga-lembaga ini. *Gitu* kan? Akhirnya ya kita hanya mendorong, menghimbau, *gitu*. Tapi yang bisa ikut menyelesaikan saya kira, penyelesaian dengan sistematis itu. Bagaimana soal undang-undangnya, bagaimana soal kenaikan anggarannya, bagaimana soal organisasinya.

Nah Bapak-Bapak sudah membuktikan misalnya ketika dikasih anggaran dari kondisi dulu WDP sekarang jadi WTP, itu sudah sangat bagus. Nah jadi kinerja di lapangan juga mungkin perlu, Bapak-Bapak ini kadang-kadang perlu atraksi juga, Pak. Tadi benar yang disampaikan Mas Rizki itu. Jadi perlu atraksi. Dulu Indonesia itu merdeka dengan bambu runcing saja. Orang Belanda itu paling takut itu kalau melihat bambu runcing, membayangkan perutnya kena bambu runcing, itu jauh lebih takut daripada kena peluru, kan? Vietnam ditakuti juga karena bambu runcingnya.

Nah Bu Susi itu ditakuti juga karena berani dia membuat gertakan, "tenggelamkan" itu kan. Nah Bakamla, jangan jadi *good boy*, Pak. Kalau jadi *good boy*, *enggak* akan jadi perhatian, Pak. Ya di republik ini kan juga begitu, modelnya. Kadang-kadang ya perlu atraksi-atraksi *dikit*, begitu. Kalau perlu pas DLCS itu, pas kapal Cina agak masuk-masuk wilayah Indonesia, Bakamla atraksi di situ, itu. Wah itu seluruh dunia akan memberi perhatian *Iho*. Nah nanti kalau atraksi Bapak itu menarik dan sukses, itu pawang datang, Pak. Bukan Bapak yang mendatangi pawang. Ya kalau Bapak cari jalan ke pawang itu mungkin susah. Tapi kalau sudah dengan atraksi, pawang datang sendiri, nah itu, baru. Bapak mau minta apa saja, akan mendapatkan jalan.

Nah saya kira bagaimana caranya Bapak dengan bambu runcing yang dimiliki di laut, tapi musuh-musuh, lawan-lawan yang mau sembrono dengan Indonesia itu, *enggak* berani, kapok itu. Nah saya kira ini yang mungkin kita, ingin *nunggu* juga, Pak, apa atraksi Bakamla yang menarik, sukses, terukur, Pak. Terukur Pak, terukur. Ya kalau buat atraksi kan terukur, kalau *enggak* terukur nanti ya jadi korban sendiri kan. Nah tetapi itu, itu saya kira perlu dicoba, Pak. Saya lihat *so far*, sampai selama ini ya Bakamla ini masih jadi *good boy*, lah. Jadi akhirnya tidak jadi perhatian. Nah mudah-mudahan saya ngomong *ngalor-ngidul* ini bisa ditangkap esensinya Pak.

Terima kasih Pak.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Baik, terima kasih Bapak DR. Sukamta.

Beliau ini kali ini menyuruh Bapak jadi orang yang beratraksi tapi kalau dia *ngajari* muridnya tuh selalu *sami'na wa atho'na*, katanya. Itulah hebatnya politisi. Kapan petuahnya, tergantung situasi.

Ibu-Bapak,

Enam pertanyaan sudah disampaikan dari anggota sampai Pimpinan. Saya persilakan, yang jelas *tone* ada di Komisi I adalah mendukung Bakamla, mendukung RUU ini bisa segera luncur.

Silakan Pak Ses.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih atas masukan maupun arahan-arahan dari Bapak-Bapak semua.

Kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang terhormat Komisi I DPR RI. Yang pertama Pak Sturman, senior kami ini Pak Sturman, pelari. Mungkin meyakinkan pemerintah dan stakeholder untuk mendukung RPP dan RUU Kamla. Mungkin ini kalau kami jawab jujur, sekarang diruangan ini ya, apalagi tertutup. Kami beranilah.

Jadi selama ini Pak, kami sudah berulang kali Pak, Ka. Bakamla, saya, dan seluruh perwira ini, yang hadir ini, untuk memberikan keyakinan kepada pemerintah dan *stakeholder*, tidak kurang-kurang Pak. Dan yang terakhir, Bapak KaBa sendiri sudah menghadap ke Seskab, sudah menghadap ke Menko Polhukam, ke Pak Luhut, dan lain sebagainya, itu salah satu apa, upaya beliau, sebagai pimpinan kami yang tertinggi di Bakamla, untuk melaksanakan hal seperti itu.

Kemudian untuk meyakinkan *stakeholder*, nah ini kami sudah ada, apa, hal-hal lain yang perlu kami laporkan. Jadi kita sudah melaksanakan rapat koordinasi, ini inisiatif kita, Pak. Tidak ada inisiatif lain. Ini inisiatif kita, bukan dari pemerintah juga. Jadi kami melaksanakan Rakor Kamla sudah 9 kali, Pak. Jadi artinya mereka tidak, tidak, apa, lho kenapa kami kok dipimpin terus oleh Bakamla, tidak ada suara seperti itu, tidak ada. Di Rakor Kamla ini justru menurut kami ini sangat-sangat bernilai strategis, untuk penyatuan Kamla ini sebetulnya. Dan kami membutuhkan, bahwa Kamla ini bersatu. Ya sekarang memang bersatu, tapi tanda petik, dulu Pak. Seperti yang diuraikan Bapak-Bapak semua, Bapak-Bapak lebih tahu situasi dan sebagainya.

Nah terus untuk masalah di Rakor Kamla ini, itu sudah arah-arahan, Pak. Jadi semuanya stakeholder itu menyetujui apa yang dilakukan oleh Bakamla. Artinya secara tidak langsung ya mereka semua mengakui adanya itu. Tetapi tiba-tiba di RPP dan sebagainya, enggak bisa lagi, dan sebagainya. Nanti mungkin kalau diizinkan, nanti Diskum kami akan menerangkan, karena dari pertanyaan tadi ada pertanyaan, sampai di mana RPP ini kalau tidak selesai-selesai, nanti di hukum kami yang akan jujur mengatakan sampai di mana apa perkembangan RPP itu.

Kemudian *stakeholder* pun sudah diyakinkan, bahwa kita membutuhkan ketua kelas. Jadi enggak sendiri-sendiri, seperti sekarang ini. Kami jujur Pak, kami baca, bahwa Bakamla itu suatu badan, lain dengan KPLP. KPLP bertanggung jawab kepada menteri, pada Dirjen. Dirjen kepada Menteri, jadi masih ada sub-subnya lagi. Tapi kalau Bakamla, untuk masalah keamanan laut, tidak mensub-kan lagi. Bakamla memang Badan Keamanan Laut yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi artinya perlu disadari oleh para perangkat negara ini, bahwa jika terjadi apa-apa di laut ini, baik di internal lautan kita sendiri atau pun di eksternal lautan luar, yang ada WNI, yang bekerja sebagai ABK kapal, terjadinya apa-apa di laut. Itu seharusnya semua bertanya kepada Bakamla, seperti yang dilakukan oleh APMN, atau US *Coast Guard* ataupun *coast guard*-nya. Sama seperti itu. Semua *cost guard*, sama. Jadi yang ditanya adalah *coast guard*-nya dulu, oleh pemimpin negara ini. Nah kalau kita, *ndap* Pak, sulit Pak, cerita apa-apa, tanya, ini enggak tahu, ini enggak tahu, ini enggak tahu.

Nah kita sekarang ini ingin mengintegrasikan semuanya di dalam RPP ini, salah satu tujuannya. Ingin mengintegrasikan semua, sistem integrasi mereka itu juga terjadi kejadian-kejadian apa-apa, ayo, Bakamla nanti yang akan melaporkan ke Presiden dan sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang ada hentakan di situ, Pak. Jadi seakan-akan, oh Bakamla nanti mimpin kita. Nanti kita *enggak, ngapain*, kita hilang nanti fungsinya. Nah ini sebenarnya tidak ada Pak, seperti itu. Sudah diyakinkan di dalam Rakor Bakamla, Rakor Kamla, sampai 9 kali ini. Tapi mudah-mudahan kami optimis Pak, bahwa negara kita adalah negara maritim. Kita membutuhkan *coast*

guard. Itu sudah suatu kebutuhan yang sangat *urgent* sekarang ini, situasi dunia seperti sekarang ini.

Jadi dalam masa damai, kita tidak ingin, saya menyarankan berulang-ulang, termasuk Bapak Ka.Ba juga, pada Menko Polhukam, Pak Luhut, bahwa dalam menerapkan sistem informasi, sistem patroli ini, jangan mengedepankan dulu kapal perang. Terutama di perbatasan. Nah nanti hubungannya dengan landas kontinen juga nanti. Jadi mengedepankan lah *white hole* tadi, mereka pakai kapal putih, kita kapal putih. Jadi mereka adalah petugas sipil, kita juga petugas sipil. Jadi tidak ada konstelasi ataupun situasi ini akan berubah drastis, jadi situasi yang panas. Nah sekarang ini *ndak*. Karena tidak ada, siapa yang bertanggung jawab? KRI akhirnya, kapal perang yang ada di depan. Yang ini yang kita tidak harapkan, seperti itu. Nah mudah-mudahanlah ke depan ini kita akan, RPP ini bisa digolkan dengan gol sesuai dengan harapan kita semua.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D):

Pimpinan.

Boleh saya ini?

Pak Sestama.

Saya mendengar *statement* ini, itu sudah sejak 5 tahun yang lalu, Pak. Bahwa kalau patroli itu harus sipil, Bakamla yang di depan, bukan kapal laut, kapal perang, *gitu*. Itu sudah lima tahun yang lalu, Pak. Nah artinya sebetulnya persoalan ini sudah dipahami, Cuma tadi, Bapak mungkin belum bisa meyakinkan pada *stakeholder* utama, pada pawangnya itu. Bahwa masalah yang sudah dipahami itu kemudian diambil keputusan tertentu, kasihkan kepada Bakamla, *gitu loh* Pak.

Jadi kalau bab soal diundang rapat berkali-kali, dipahamkan, sudah paham mereka ini. Cuma kan ya paham doing, belum mau melepaskan, *gitu loh*. Nah artinya pendekatannya masih belum tajam, belum kuat, begitu Pak.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Siap Pak, kami mengerti Pak, kalau itu.

Dan kami juga tetap tidak, tidak, Insya Allah tidak akan diam, kami akan berusaha terus untuk meyakinkan para *stakeholder* ini dan mudah-mudahan ini dengan adanya RPP ini nanti ini, ada suatu lanjutan, ada suatu apa, legalitas, bahwa memang ada ketua kelasnya di situ, Pak.

Kemudian untuk anggaran pasti didukung, DPR akan *support*, kami terima kasih, Pak Sturman. Kemudian menjaga tidak tersinggung *stakeholder* lain, kami juga di dalam rapat koordinasi ini, kami justru merekatkan, Pak, merekatkan semuanya. Dan Bapak Ka.Ba sendiri, kemudian saya sendiri, dengan direktur-direktur ini, ini selalu *sowan* Pak. Bergantian. Kepada, di Mabes AD, kemudian ke BNN, kemudian ke Polri, dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada hubungan yang harmonis sebetulnya. Mudah-mudahan saja ini ada pengertianlah. Tapi tetap saja Pak, ada saja hal-hal lain yang tiba-tiba begitu ada hal yang seperti ini, mereka tidak mau, dan sebagainya. Nah itu, itu kami maklumi, hal-hal seperti itu. Tetapi kita sebagai ini, kita tidak diam. Terus kita itu kan, Pak.

Nah terus kami gembira juga, kemarin Bapak KASAL sudah menginstruksikan kepada seluruhnya, bahwa Bakamla, jangan apa, tidak perlu MoU yang terlalu dalam lagi. "Bapak silakan pakai semua pangkalan Angkatan Laut di seluruh Indonesia ini, untuk kapal-kapal Bakamla". Dan sebagai sejarah bagi Bakamla mungkin kapal-kapal Bakamla sudah sandar di tempat terhormat di Dermaga Madura, yang dibanggakan oleh Angkatan Laut itu. Pernah kita tiga kapal sandar betul di situ, Pak. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bapak KASAL. Artinya ada dukungan penuh dari Angkatan Laut ini Pak.

Kemudian dari Polri pun sama. Dan akan terus, akan berlanjut seperti itu Pak, mudah-mudahan saja. Kami akan menjaga ini Pak, ketersinggungan antara *stakeholder*, kami jaga betul.

Kemudian

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Izin Pak Ketua, sebentar.

Pak, yang jadi pertanyaan terkait dengan itu, apa, adanya *overlapping responsibilities*, tanggung jawab yang *overlap* antara lembaga dan lain sebagainya, mungkin baik kalau, karena kita juga kan ingin menciptakan rancangan undang-undangnya, Pak. Jadi baik mungkin dari Bakamlanya sendiri, Litbang dari Bakamla, membuat suatu konsep bagaimana nanti yang bisa disodorkan kepada kami sebagai acuan. Nanti dari KASAL, dari apa, Angkatan Laut juga pasti mempunyai konsep sendiri. Ya mungkin disinkronisasikan, jadi kita mudah mengerti. Karena jujur, belum tentu semua anggota yang duduk di sini pun sebetulnya secara teknis di laut itu mengerti detailnya seperti apa. Jadi di mana kita sekarang, dan mau ke mana kita, kira-kira yang idealnya. Apalagi dengan adanya Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen, dan sebagainya, keamanan laut, tentu ini menjadi hal yang sangat penting, Pak Sestama.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan. Izin Pak, sini Pak.

Saya hanya menyarankan

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Silakan Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya hanya menyarankan kepada Pak Sestama dan Tim, pemerintah biasanya mendelegasikan undang-undang seperti ini itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Coba di sana dicek Pak, biasanya itu yang terjadi, biasanya. Nah seperti ini biasanya ke sana. Coba cek di sana, apakah ada. Karena sudah sempat masuk prolegnas prioritas. Tiba-tiba menghilang lagi barang itu. Nah jadi tolong dicek di sana. Jadi tidak cukup hanya ke Polhukam, tidak cukup ke, ke semua lini lah. Bila perlu, ke lobang semut pun Bapak tanya, kasarnya begitu. Supaya memang benar-benar tidak ada lagi gesekan atau bahkan penghalang, sekecil apapun itu.

Demikian saran, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Silakan Pak Imron.

Ya Pak Imron, ya. Nanti biar beliau semua jawab dulu, ini biar ini Pak Imron, nanti biar beliau selesaikan, nanti kalau mau ada pendalaman. Silakan Pak Imron.

F-GERINDRA (R. IMRON AMIN, S.H., M.H.):

Sedikit menambahkan, Pimpinan.

Tadi sangat menarik juga yang disampaikan oleh Pak Sukamta tadi, dan beberapa catatan tadi saya membaca, memang kendala-kendala di Bakamla ini dari tahun ke tahun mungkin hal yang sama, terkait kebijakan dan kewenangan, saya melihat masih mohon maaf, tidak sesuai dengan cita-cita kita bersama. Sebenarnya sederhana saja, Bapak, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala di Bakamla sendiri sehingga kita melihat apa ya, yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan cita-cita kita bersama.

Kita lihat dari beberapa RDP, rapat, saya merasa keluhannya hampir sama. Tapi untuk apa, kemajuan Bakamla, tentunya kami sangat mendukung dan sangat mengapresiasi. Jadi singkat saja, pertanyaan saya, sebenarnya apa yang jadi kendala di Bakamla itu sendiri? Tadi

yang disampaikan, di prolegnas masuk, tiba-tiba hilang, ini apa sebenarnya, kok bisa menjadi begini itu, bagaimana, gitu Pak.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Ibu menanggapi apa mau bertanya baru?

F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO):

Mau menyarankan saja, katanya yang ngawur-ngawur juga, siapa tahu berguna. Katanya kalau bicara.

Begini, mungkin, ya saya sedih sekali Pak, mendengar semua masalah ini sudah lima tahun, tujuh tahun. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak TB ini, Pak Jenderal, memberi wawasan untuk saya juga. Mungkin salah satu kalau pawangnya itu bukan internal saja, di pemerintahan saja. Mungkin perlu adanya *public pressure* Pak. Biasanya kalau saya lihat ada *public pressure*, angkat di medsos, angkat bicara di mana, masalahnya seperti ini, itu saja Pak, yang saya ingin sampaikan. Tapi kalau saya perhatikan, di medsos itu kuat sekali. Bagaimana Bapak itu sudah berjuang sekian lama, tapi kan tidak terangkat sekarang masalah-masalah ini. Jadi mohon mungkin lebih, harus ada *public pressure*, menurut saya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Saran Bu Itet, *public pressure*. Itu nanti kebijakan di Bapak.

Silakan Pak, jawab dulu semua, kita segera membuat kesimpulan.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih Pak.

Kami jawab yang pertanyaan dari Pak Lodewijk, jadi yang pertama ada sedikit penyimpangan antara RPP dengan Undang-Undang 32 tentang Kelautan, Tahun 2014. Bahwa Undang-Undang Tata Kelola dan Kelembagaan, tapi RPP mendefinisikan lain. Jadi mohon izin Pak, kami sudah dibentuk panitia ataupun Pokja yang diketuai oleh Menkopolkam dalam hal ini. Kemudian menugaskan Deputi III Polhukam untuk sebagai ketua. Nah dari Pasal 69 itu sangat luas, jadi dari aspek undang-undang, rancangan undang-undang ini diarahkan untuk penajaman hanya pada keamanan dan keselamatan laut saja, Pak. Kemudian Pasal 69 sendiri tidak hanya mengatur tentang Kamla saja, tetapi juga keseluruhan dari aspek kelautan, termasuk juga ekonomi, kelautan, diplomasi, dan lain-lain. Maka dari itu, berdasarkan hasil rapat di Polhukam yang dipimpin oleh Deputi III atas izin dari Menkopolkam, kemudian Setneg juga, apa Sekretaris Negara juga hadir di situ. Ditetapkan bahwa dasar RPP tetap Pasal 69. Namun dikhususkan hanya terkait dengan keamanan laut, keselamatan laut, dan penegakan hukum. Itu saja Pak.

Kemudian pertanyaan kedua, Cina selalu bertindak lebih dominan di LCS, dengan menerbitkan Undang-Undang Maritim. Kemudian juga mengizinkan untuk menembak. Selanjutnya juga tambahkan lagi ada perizinan-perizinan seluruh kapal yang lewat LCS, harus lapor ke Cina. Kami sudah koordinasikan hal ini dengan Atase Pertahanan Indonesia yang ada di Cina, bahwa kita minta informasi-informasi tersebut dan kemudian disosialisasikan di dalam webinar oleh Cina sendiri. Kita juga mengikuti hal tersebut. kemudian pertanyaannya itu apa tanggapan kami mengenai hal tersebut. Tanggapan kami Pak, dari Bakamla ini sebetulnya, kami ini harus tidak bekerja sendiri tapi kita harus bersinergi dengan yang ada di, apa, aparat yang bisa sampai ke ZEE. Dalam hal ini adalah Angkatan Laut, dan KKP, dan Bakamla. Tiga ini Pak, yang di sana itu, sesuai dengan undang-undang. Nah untuk itu kami hanya menginginkan bahwa tetap Pak, ini apa, mungkin alasan klasik kami juga, bahwa Bakamla membutuhkan anggaran untuk ke sana. Karena kapal sendiri, kami siap, tetapi sampai saat ini, tidak ada namanya bahan bakar itu. Kami sudah

berkirim surat kepada Kementerian Keuangan, tapi ada jawaban bahwa ini semua harus apa, sebagai prioritas adalah masalah pandemi dulu ini ya. Makanya kami tidak bisa untuk melaksanakan apa yang direncanakan oleh Bakamla, untuk melaksanakan patroli sampai ke arah sana.

Kemudian yang kedua, ya, kami juga akan meningkatkan sistem peringatan dini kami, Pak. Makanya kami ke Bappenas, untuk meminta suatu apa, arahan dari Bappenas, karena kami punya rencana, sesuai dengan Undang-Undang Tahun 32 ini, bahwa sistem peringatan dini, semuanya ada di Bakamla. Dan kami akan membangun itu dan itu sudah disetujui oleh Bappenas, ini nanti di proyek 2022. Jadi sistem peringatan dini sampai melihat ZEE nanti. Sekarang kita tidak bisa melihat Pak, kita hanya melihat butir-butir yang mereka itu mengeluarkan spot. Tapi kalau mereka tidak mengeluarkan spot, tidak terlihat. Tapi kalau kita cek di dengan menggunakan pesawat, dengan menggunakan mata telanjang seperti ini, baru kelihatan, apa yang terjadi sesungguhnya di sana. Kita pernah *ngecek*, Pak, bukan hanya PangKogabwilhan I saja waktu Pak Yudo Margono, kami *ngecek* dengan pesawat sewa kami itu. Sampai ke ZEE sana, dan terlihat memang banyak kapal-kapal di daerah *overlapping* kita itu. Antara landas kontinen dengan ZEE. Berapa ratus jumlahnya, kapal ikan dan sebagainya. Dan itu sudah hampir bertahun-tahun disitu. Dan kami sudah laporkan juga ini kepada Kementerian Luar Negeri, Kemlu. Dari Kemlu juga sudah mengadakan rapat-rapat dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini Vietnam dan Cina. Termasuk masalah kapal *coast guard*, yang membayang-bayangi atau masuk di landas kontinen kita yang ada itu irisan *nine dash line* di situ, ini kami sudah laporkan, Pak. Ke Kemlu juga.

Jadi masukan kami, mohon ini menggunakan diplomasi dulu dengan Kemlu. Jangan sampai situasi ini menggunakan kapal-kapal perang, menggunakan kapal-kapal *coast guard*, yang mengakibatkan nanti akhirnya bertumburan Pak, akan konstelasinya lain. Tapi seandainya diplomasi ini kuat, mereka akan meninggalkan area itu. Nah selama ini mereka tidak mau. Mereka tidak mau, bertahan, tetap bertahan, bahwa ini adalah irisan *nine dash line*. Di situ ada *rig noble* milik kita, yang digerakkan oleh ESDM. Tapi kita tetap me, me-*shadow-ing*, me-*shadow-ing*, artinya kita membayang-bayangi mereka terus. Membayang-bayangi mereka terus. Mereka pun diberikan apapun, pakai radio apapun, mereka tidak menjawab. Artinya mereka tetap, yang penting dia tidak mendekat, dan tidak mengganggu dari pekerjaan ESDM tersebut, Pak, yang di Cina itu, yang di mana, yang di daerah landas kontinen kita itu. Jelas-jelas masuk landas kontinen kita, itu Pak. Nah terus kita berkoordinasi dengan Kogabwilhan I dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk meminta bantuan KRI-KRI yang ada di situ. Dan Alhamdulillah, Bapak KASAL sudah menginstruksikan jika kapal akan ke utara Pak, akan naik ke utara. Akan mendekati untuk membantu Bakamla ini, karena Bakamla masih di bawah semuanya. Karena situasional yang saya ceritakan tadi itu, Pak, jadi bahan bakar yang mungkin kita kekurangan untuk ini. Makanya kemarin ada, ada, kami minta arahan daripada Komisi I yang kemarin disampaikan oleh Pak, kalau enggak salah Pak, Pak siapa? Yang kemarin, BA-BUN. Pak siapa, BA-BUN? Pak Bobby. Nah Pak Bobby, BA-BUN, ini akan kita belikan untuk bahan bakar itu tadi. Tapi ini masih belum, sampai saat ini. Tapi untuk mengisi kekosongan itu, kami tidak diam, kami tetap berkoordinasi dengan Angkatan Laut dan AKP Pak, untuk minta bantuan di ZEE sana itu, terjadi apa-apa. Paling *ndak* kita melaksanakan suatu pemantauan dengan menggunakan alat kita ini, yang ada di Puskodal Bakamla ini. Tapi pemantauan itu berdasarkan kalau mereka *spot*-nya naik, dia akan ketangkap oleh *spot* kita, oleh radar kita, dan sebagainya. Nah nanti kalau nanti ini sistem peringatan ini sudah setuju oleh Bappenas, dibuat nanti di 2022, disekitar Laut Cina Selatan itu pasti akan terlihat siapa-siapa di situ, walaupun dia mematikan AIS-nya dan sebagainya. Nah ini akan berpengaruh, dan itu merupakan mungkin efek, salah satu efek detterren kita pada Cina. Nah sekarang kan kita tahu, bahwa kita tidak ada kapal di situ. Dan sebagainya. Itu mungkin jawaban dari kami untuk Pak Lodewijk, Pak.

Kemudian Pak TB Hasanuddin, kami terima kasih atas dukungannya, kepada Pak Hasanuddin. Bahwa memang betul Pak, jadi semua kegiatan ini, kejahatan ini, asalnya itu di dan lewat laut, semuanya, terutama yang kami waspadai sekarang ini adalah narkoba. Kami sudah koordinasi dengan Kepala BNN, Pak Petrus Golose, bahwa 14 ton per tahun, itu masuk di, 14 ton apa, sabu, masuk di perairan kita, Pak. Masuk ke negara kita ini. Empat belas ton untuk merusak generasi kita itu lewat laut. Jadi kita membutuhkan suatu memang, suatu ketua kelas di sini, Kamla itu. Siapa yang harus menggerakkan ini, jadi *enggak* numpuk. Sudah dikoordinasi, masih numpuk di situ. Tapi namanya di wilayah-wilayah barat, wilayah barat Sumatera, itu kosong, kadang-kadang. Apalagi wilayah selatan ini, kosong. Sampai ada kemarin kami dapat berita dari Puskodal kami, itu pun berita dari ABF, dari *Australian Border Force*, bahwa ada kapal Cina yang diduga kapal mata-mata, masuk perairan Cina. Eh masuk perairan Australia. Ini mohon diwaspadai oleh Indonesia. Diberitahu itu, Pak, jenis kapalnya apa, dan lain sebagainya apa. nah ini bentuk dari upaya kita untuk kita memanfaatkan teman-teman *coast guard-coast guard*, yang di wilayah kawasan ini, Pak. Untuk mewaspadai semuanya apa yang masuk di wilayah kita itu.

Kemudian juga banyak hambatan untuk membentuk Indonesia *Coast Guard* ini, itu kami sadari betul, Pak. Sampai hari ini, RPP itu akan dilaksanakan juga, ini sudah rapat ke berapa? Rapat ke-4, masih belum selesai juga. Tapi nanti akan dilaporkan secara lengkap oleh Dirikum kami nanti.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Pimpinan.

Saya akan menambahkan saja ya, bahwa RUU itu pernah menjadi skala prioritas, ya. Sebaiknya ditelusuri saja itu ya, di Setneg, kemudian di Kementerian Kumham, begitu. Kemudian dikoordinasikan ke DPR, ya, kemudian DPR nanti kan ada Bamus, kalau itu masuk lagi menjadi prioritas kemudian selesai, asal kemudian dikeluarkan Ampresnya, saya kira akan segera digarap di Komisi I. Supaya tidak berlarut-larut. Soal perbedaan pasal, pendapat RUU ini dengan Undang-Undang Kelautan dan sebagainya, itu nanti didiskusikan di sini, di ruangan ini. Begitu. Kalau berbicara substansi. Karena begini juga ya, saya juga bingung, kok *ujug-ujug* kita menggarap yang namanya RUU Landas Kontinen. Akan bertambah wilayah kedaulatan, kedaulatan, ya, bukan territorial. Wilayah kedaulatan di laut, sekian juta hektar di laut. Lalu *piye carane ngamankan?* Wong Undang-Undang Keamanan Lautnya kita belum ada, ya? Jadi mau siapa? Kenapa kok tidak keamanan laut dulu, sudah siap, baru sesudah itu kita berbicara landas kontinentalnya. Malah saya jadi curiga, jangan-jangan setelah laut kita bertambah wilayah zona kedaulatannya, dan di bawah itu ada macam-macam, tambang, ada macam-macam minyak, gas, dan sebagainya, lalu nanti yang menikmati, oh karena kita demi keamanannya, lalu karena kita tidak ada uang dan sebagainya, sudah, kita serahkan saja kepada saudara kita ini, yang sudah pintar. Ya sudah. Sama juga dengan Freeport. Mungkin. Atau sama juga dengan apa itu, nikel, itu kan bukan orang Indonesia, di sana yang menggali nikel itu. Sembilan puluh delapan persen, asing. Nah ini apa besok itu kita mau seperti ini lagi? Setelah bawa ini diakui ini daerah kedaulatan Indonesia, tapi kita tidak memiliki kemampuan mengamankan, kemampuan mengeksplorasi. Ya sudah akhirnya apa? Asing lagi. Kalau *enggak* asing ya, aseng katanya. Terus saja, begini, ya. Ini masalah undang-undang dan tujuannya apa coba? Kok semudah itu, ya, undang-undang yang penting dibelakangkan, yang tidak terlalu penting, didahulukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Silakan Pak Ses.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih Pak Hasanuddin.

Ya Bapak bingung, apalagi saya, Pak, itu. Sebetulnya memang betul Pak, dari dulu kita sudah meneriakkan, saya sejak letnan, saya mengurus Kamla terus. Jadi Kamla ya 76 tahun negara kita merdeka, masih seperti ini. Jadi belum ada namanya *coast guard*. Padahal kita diundang bolak-balik, *cost guard* Indonesia hadir, *cost guard* Indonesia hadir, dan itu alamatnya, suratnya adalah ke Bakamla terus. Sampai kemarin pertemuan *Coast Guard Summit* di Jepang 2019, itu Bakamla yang hadir, karena yang diundang Bakamla, oleh mereka itu. Jadi kita hadir di situ. Jadi intinya dari hasil *Coast Guard Summit* itu, bahwa kedepankan pada saat diperbatasan itu, dengan kapal *white hole* semuanya, jangan sampai ada kapal perang. Sebisa mungkin seperti itu, Pak. Sebisa mungkin seperti itu. Nah ini Pak, terima kasih atas dukungan Pak Hasanuddin. Dan kami tetap Pak, kami tetap berusaha terus, kami tetap tidak menyerah ini, kami akan melakukan apa yang sudah menjadi arahan dari Komisi I ini, untuk kami nanti jelaskan pada rekan-rekan kami, stakeholder yang lain, untuk memberi pengertian, bahwa alangkah pentingnya apa, peningkatan keamanan laut yang sinergi dan sesuai yang diharapkan oleh negara ini Pak.

Kemudian ke Pak Rizki. Apa yang menjadi permasalahan RPP tidak selesai-selesai. Nah mungkin izinkan Pak Ketua, nanti Dirikum untuk menerangkan mengenai RPP sampai sejauh mana, Pak.

DIREKTUR HUKUM BAKAMLA (LAKSMA BAKAMLA DR. ERRY HERMAN, M.P.A):

Terima kasih Pak Sestama.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat,
Yang Saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Anggota Komisi I DPR yang terhormat,**

Izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan regulasi dalam rangka penguatan Bakamla. Pertama-tama saya menyampaikan juga bahwa perkembangan RUU Kamla, memang tidak masuk dalam prolegnas 2020. Kami melihat bahwa alasannya karena mungkin Pak, ini faktor covid, mengakibatkan landas kontinen yang lebih didahului. Tapi pada intinya, Polhukam ini mendahulukan RPP sebagai sasaran antara jangka pendek, untuk menatakelolakan persoalan-persoalan keamanan dan keselamatan laut, khususnya perdagangan hukum.

Dan selanjutnya akan digagas juga untuk masuk dalam prolegnas 2022 untuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut, yang akan menyederhanakan undang-undang sektoral yang sama-sama kita ketahui ada 22 kurang lebih undang-undang sektoral yang akan disederhanakan dalam satu persoalan, untuk menata keamanan laut.

Berkaitan dengan sasaran jangka pendek RPP ini sendiri, sesuai dengan arahan Bapak Menko Polhukam, memang ini merupakan satu atribusi mandat dari Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tidak ada sama sekali undang-undang sektoral yang menjadi dasar pertimbangan dalam RPP ini. Itu yang pertama, Pak.

Dan kenapa alasannya Pasal 69? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sestama, Pasal 69 ini kita hanya memfokuskan pada kebijakan tata kelola, karena di sana jelas-jelas ada Pasal 69 yang menyebutkan bahwa kebijakan tata kelola khususnya pembangunan kelautan. Nah permasalahannya kenapa RPP ini menjadi Tata Kelola Keamanan, Keselamatan di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Ini sebetulnya dalam rangka penguatan Bakamla. Dan ini dikerucutkan dalam satu ruang lingkup RPP itu sendiri, kita membahas 3 hal tentang Tata Kelola Keamanan Laut. Pertama, bagaimana mensinergikan dan memonitor. Mensinergikan dan memonitor ini merupakan turunan dari Pasal 62 fungsinya Bakamla. Nah fungsi Bakamla ini kalau kita lihat ada 7 fungsi, dan mencerminkan sebetulnya fungsi-fungsi *coast guard* secara universal, Pak, di situ. Itu tujuannya hanya mensinergikan dan memonitor. Yang kedua, mengintegrasikan sistem informasi. Jadi pada dasarnya, memang tata kelola ini tidak ada satu kewenangan KL-KL lain yang diambil, Pak. Mereka tetap melaksanakan tugas pokok sesuai wewenangnya. Bakamla hanya mensinergikan. Itu sebetulnya roh dari RPP ini, Pak.

Nah kaitannya dengan dinamika di lapangan, tadi disampaikan Pak Lodewijk, mohon izin Pak, tadi Bapak sampaikan dua kali, sebetulnya sudah empat kali, Pak. Kita sudah melaksanakan panitia rapat antar kementerian yang dipimpin Polhukam sudah 4 kali. Ini dasarnya memang sesuai dengan, izin prakarsa Bapak Presiden, yang ditugasi Bapak Menko Polhukam sebagai pimpinan untuk mengatur ini semua. Sudah 4 kali. Kami melihat tidak ada *deadlock*, sebetulnya Pak. Ini hanya persepsi saja yang harus kita samakan, Pak. Pandangan-pandangan yang ada sebetulnya cukup konstruktif. Dan kita berusaha di rapat-rapat tersebut untuk mengakomodir pandangan-pandangan daripada KL. Ke depan kita akan ada rapat satu kali lagi Pak, rapat untuk melakukan uji publik. Nah uji publik ini kita akan mengundang ide-ide dari para akademisi, dan juga penggiat maritim untuk melihat sampai sejauh mana RPP ini bisa diimplementasikan di lapangan.

Demikian Pak, yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana perkembangan RPP.

Terima kasih Pak Ses.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Pak Ketua.

Mungkin penting untuk kita bisa menegaskan, sebenarnya *to be fair*, Pak, waktu apa namanya Rancangan Undang-Undang Kamla ini masuk ke dalam salah satu prolegnas, kita juga agak bingung kan, waktu itu. Karena masih menyangkut terkait dengan laporan BPK yang waktu itu masih *disclaimer*, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pertimbangan kita. Tapi faktanya sekarang sudah baik, ya ayo kita bangun konsep bersama, gitu lho. Dari Bakamla konsepnya seperti apa terkait dengan ini, sinkronisasikan dengan stakeholder lainnya. Tapi yang lebih penting tadi yang atraksinya itu Pak. Karena kalau kita lihat memang gaya kepemimpinan dari Pak Presiden agak reaktif. Harus ada isu dulu, harus ada dibuat isu besar dulu, baru habis itu ada mitigasi ataupun isu ini bakal di-*address*.

Jadi itu mungkin masukan dari saya, Pak.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Ya, silakan Pak Ses.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih Pak Rizki.

Ini ada pertanyaan lagi, revisi RUU Landas Kontinen, bagaimana dengan Bakamla. Jadi kami laporkan Pak, tanggal 2 September kemarin, Ka. Bakamla sudah diundang dan memberi masukan kepada panitia atau Panja RUU Landas Kontinen yang dipimpin oleh Bapak Hasanuddin terkait RUU Landas Kontinen ini.

Kemudian kedua, saat ini Bakamla sedang menyusun masukan kepada PAK atau Panitia Antar Kementerian - RUU Landas Kontinen, untuk penguatan fungsi dan peran Bakamla. Salah satunya yang kami monitor adalah kami memberikan kesempatan kepada ketua, dalam hal ini Pak Hasanuddin, bahwa penguatan di salah satu penguatan Bakamla adalah Bakamla sebagai penyidik, di situ. Sebagai penyidik di Bakamla. Nah ini yang mungkin untuk RUU Landas Kontinen ini. Walaupun bagaimanapun, Bakamla akan terus mendukung apa menjadi komitmen dari pemerintah untuk Landas Kontinen ini.

Kemudian yang kedua, yang berikutnya, terkait teknologi. Apakah sudah menuju ke arah teknologi yang memadai yang untuk Bakamla bisa memonitor laut, situasi laut. Kami sudah jelaskan tadi, bahwa tahun 2020 Insya Allah sudah dimulai, Pak. Jadi pembangunan sekarang sudah direncanakan oleh Bappenas. Jadi mengenai sistem peringatan dini. Ini akan dibangun nanti per wilayah, per zona barat, zona tengah, zona timur. Dan salah satu sebagai yang prioritas adalah di Laut Natuna Utara atau perbatasan dengan Laut Cina Selatan. Itu yang paling menjadi prioritas. Jadi ZEE kita yang paling jauh di situ. Termasuk juga kita akan, ya Insya Allah ini, kita akan bisa memonitor nanti jika ada *drone* bawah laut ataupun *sea glider* yang sampai saat ini masih belum terkuak siapa sebenarnya yang punya *sea glider* ini. Nah ini yang mungkin kami mohon penguatan ataupun mohon dukungan dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu semua yang terhormat Anggota Komisi I ini.

Kemudian apakah bisa diupayakan dengan efek gentar, terhadap negara Cina dan sebagainya? Yang kita sekarang ini, di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna Utara itu, ada dua negara, Pak. Ini adalah Cina dengan Vietnam. Untuk itu, kita efek gentarnya apa? Salah satu efek gentarnya adalah yang tahun 2019 akhir, kejadian itu. Jadi Bakamla mengusir *coast guard* Cina, mungkin masuk sampai ke Mata Najwa dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan yang paling krusial, bahwa, dari Ka. Bakamla saat itu Pak Taufik, mengatakan bahwa Bakamla tidak dipersenjatai, sama sekali. Nah ini, ini sebetulnya yang dibilang tadi itu, kita bukan tidak mau menjadi *good boy*, tadi itu yang dikatakan tadi Bapak tadi ada yang mengatakan sebagai *good boy*. Kita tidak mau seperti itu. Apapun sekarang, kita laksanakan, ya kita laksanakan. Tapi tentunya dengan suatu perhitungan-perhitungan tertentu.

Terus yang kedua adalah pada saat kasus kapal Iran dengan Panama, itu *blow up*-nya sampai ke negara-negara besar di dunia ini, sampai 2 menko turun tangan. Nah ini juga hasil kerja Bakamla. Kalau kita lihat ini efek gentar juga. Artinya, Bakamla yang dilihat tidak mempunyai apa-apa dan sebagainya, tapi kita mempunyai suatu kemauan, maunya satu semangat. Itu saja yang di ... karena apa? Kami pasti akan didukung oleh stakeholder yang lain terutama Angkatan Laut. Karena kedekatan itulah, Angkatan Laut *back up* kami itu. Nah itu. Kenapa di Bakamla banyak personilnya Angkatan Laut atau pejabatnya Angkatan Laut, atau pun perwira-perwira Angkatan Laut yang menduduki Bakamla ini? Ya karena tugasnya mirip sama dengan Angkatan Laut. Hanya ini fungsi pertahanan, kita fungsi pengamanan saja dan fungsi keamanan saja di laut. Masa damai. Ini masa perang, ini masa damai. Jadi terjadi apa-apa di kemudian hari eskalasi ini berubah menjadi eskalasi pertempuran, ataupun pertahanan, secara otomatis Bakamla akan dipakai oleh Panglima TNI ataupun Mabes TNI untuk sebagai komponen cadangan Angkatan Laut. Makanya pada saat kemarin ada rapat dengan Pak Prabowo, ya kami mengikuti itu, Pak Prabowo dengan Menko Polhukam, di situ dengan Panglima TNI juga, bahwa Pak Prabowo bilang bahwa suatu saat nanti Bakamla ini harus dipersenjatai. Nah akhirnya Alhamdulillah bisa dipersenjatai sekarang ini, sedang dalam proses pemasangan.

Yang Pak Lodewijk tadi, mohon izin Pak, menginfokan, jadi bukan 12,7 lagi Pak. Bukan 5,56 lagi. Tapi kita menggunakan 30 milimeter. Lumayan Pak, Alhamdulillah lah bisa menembak itu. Nah ini akan dipasang di tahun ini, Pak. Pemasangan di kapal 80 meter. Tiga kapal dipasang. Jadi sudah baru. Itu atas izin Menhan, kemudian Menhan bilang kepada Panglima TNI. Jadi tidak

terjadi apa-apa, Bakamla langsung nempel di Angkatan Laut. Tapi sementara ini Angkatan Laut *back up* Bakamla dulu dan lain sebagainya. Nah sebetulnya pemerintah sudah melaksanakan seperti itu, saya gembira seperti itu. Ada hal seperti itu. Itu mungkin Pak, inovasi untuk Bakamla, termasuk juga kita apa, untuk sistem peringatan dini ini, akan kita semua kan sesuai dengan undang-undang. Jadi akan kita sinergikan antara Bakamla dengan semuanya. Dengan semuanya, dengan stakeholder yang lain. Dan ini sudah kami mulai dengan Dirdatim kami ini, ini sudah datang ke Puskodal-Puskodal seluruh stakeholder ini. Untuk melihat peralatan-peralatan dan sebagainya. Dan mereka pun datang kepada Bakamla. Nah ini ada suatu kemajuan, hal-hal seperti itu Pak. Mudah-mudahan sajalah, nanti ini RPP ini sesuai dengan yang kita harapkan.

Kemudian Pak Farhan, untuk dukungan penganggaran, terima kasih Pak. Kemudian dukungan legislasi juga, apa yang bisa kita dorong, dan sebagainya. Apa yang Bapak bisa dorong, ya sebetulnya Bapak-Bapak sudah membantu kami dengan Bapak sekarang ini memanggil kami ke sini saja *nih*, luar biasa saya. Bangga kami semua, Pak. Bapak panggil secara tunggal seperti ini. Jadi ini sudah merupakan suatu efek positif bagi kami untuk semangat lagi, untuk lebih semangat lagi untuk ini. Karena ini kami bukan untuk Bakamla sendiri, kami justru untuk negara ini. Untuk Kamla ini harus Kamla yang diharapkan oleh negara, oleh rakyat. Kamla ini harus baik. Jadi sindikat-sindikat kejahatan harus menangis, melihat apa, Kamla kuat di Indonesia ini. Tidak seperti sekarang ini. Ya, 14 ton, bukan hal yang main-main Pak, 14 ton bukan hal yang main-main lagi. Amerika itu kalau sudah berton-ton masuk ke Amerika, Amerika sudah menyerang, sudah langsung balik menyerang. Nah kita kan belum. Ya 14 ton masih menerima saja semuanya. Tapi mudah-mudahan ya nanti ini sudah ada hal efek detterren untuk para sindikat kejahatan ini Pak.

Terus

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):

Mohon izin.

Dalam RUU Landas Kontinen, itu penyidik ini baru ya, perwira Angkatan Laut. Jadi belum ada perwira Kamla. Nah sebaiknya mungkin koordinasinya dengan Panja RUU ini, Landas Kontinen, untuk kemudian berkoordinasi dengan beliau-beliau itu, sehingga dalam pentahapan nanti membicarakan DIM-nya, dapat dimasukkan. Bapak nanti jangan menyalahkan kami, kalau misalnya kelewat, itu saja. Karena ternyata Panitia RUU Landas Kontinen yang dibikin oleh pemerintah juga *ndak* mengajak Bapak, ternyata, ya.

Terima kasih.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih Pak Hasanuddin.

Mudah-mudahan bisa Pak, kami segera koordinasikan setelah rapat ini Pak. Mudah-mudahan. Jadi Alhamdulillah Pak, Pak Hasanuddin dekat dengan saya, Pak. Saya dilatih sama beliau.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Dari caranya salim itu, kelihatan dekat ya.

Terus saja Pak, tinggal dua penanya tadi, biar kita bisa segera membuat kesimpulan. Karena kita 3.30 paling lama sudah selesai. Sejauh ini bukan *enggak* mau *dedicated to excellent*, tapi protabnya 2,5 jam. Silakan Pak.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Kemudian Pak Bambang Kristiono, terima kasih Pak, sudah mendukung penuh Bakamla ini, kami akan terus Pak, berusaha, sesuai dengan arahan Bapak-Bapak semua, untuk koordinasi melekat dengan stakeholder yang terkait, terutama apa yang kami koordinasikan yaitu Menko Polhukam, kami koordinasi terus. Dan dua hari yang lalu, Pak Ka. Bakamla sudah dipanggil oleh Menko Polhukam, sudah bicara masalah ini juga, keterusan dengan RPP dan sebagainya.

Terus Pak Sukamta, mendukung penuh Bakamla, terima kasih. Untuk penguatan dan lain sebagainya, Alhamdulillah Pak. Memang banyak kepentingan di laut, mungkin kami tidak ceritakan lagi, sudah banyak sekali. Dan dari laut ini bisa merusak negara kita ini, bisa menenggelamkan apa, negara kita ini juga, ini harus kita hati-hati. Memang betul apa yang dikatakan Pak Sukamta, kita ini harus, ataupun Pak Hasanuddin, kita ini harus mengetahui bahwa, mengerti betul bahwa negara kita adalah negara maritim. *Enggak* seperti dulu, negara darat, terus, dan lain sebagainya. Nah sekarang sudah, Alhamdulillah saya, jadi sudah ada pengertian ataupun apa, wawasan, bahwa negara kita adalah negara maritim. Saya terima kasih. Jadi otomatis ada penguatan di maritim itu sendiri. Itu Pak yang mungkin bisa kami jawab, Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Baik Ibu-Bapak,

Demikian 6 penanya dan pendalaman yang massif, kita akan mencoba membuat kesimpulan. Tolong diberikan kepada Pak Ses dan Kepala Biro Hukum, Bapak Dr. Erry Herman, M.P.A., *master of public relations*, kalau *enggak* salah begitu, ya Pak? Angkatan Darat, dia. Ini ada photo di sini, *Indonesia Coast Guard*, kan Bahasa Inggris *nih*. Kalau Bahasa Inggris yang benar, setahu saya kalau kata benda, ditambahi n. *Indonesian Coast Guard*. Kalau Bahasa Inggris yang benar. Tapi kalau Bahasa Inggrisnya Bakamla ya boleh, kan begitu. Ini *ngikuti* Karni Ilyas, *Indonesia Lawyers Club*. Kalau menunjukkan benda, ditambahi n. *Indonesian*. Itu *ngikuti* Karni Ilyas ya *enggak* apa-apa. *Indonesia Lawyers Club*, harusnya *Indonesian*.

Ibu-Bapak,

Ini tiga kesimpulan kita, rapat kita, mudah-mudahan ini semua dukungan, mudah-mudahan kita tidak panjang lagi. Yang lebih sebetulnya dari sana.

Komisi I DPR RI dan Bakamla sepakat urgensi penyusunan RUU tentang Keamanan Laut. Untuk itu Komisi I DPR RI mendorong Bakamla untuk menyiapkan naskah akademik yang lebih komprehensif guna menjawab keraguan para pemangku kepentingan lainnya. Ditambahi, "lainnya". Nah ini, ini dorongan, jadi basis argumentasinya adalah naskah akademik. Ini nanti tolong Pak Erry, ketentuan umumnya diperkuat. Ketentuan umumnya nanti ketahuan perannya Bakamla. Kan ada ketentuan umum, ada batang tubuh. Batang tubuh ini memperkuat ketentuan umum tadi, baru nanti ada sanksinya. Itu kan kalau bikin undang-undang begitu, Pak.

Kemudian yang nomor 2, Komisi I DPR RI dan Bakamla sepakat akan melakukan langkah-langkah strategis agar RUU tentang Keamanan Laut masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Bapak bekerja di pemerintah, kita bekerja sesama teman-teman termasuk di Baleg. Tadi Pak TB bilang, di Komisi I sudah oke kok, di Baleg, penyiaran mental, termasuk fraksi saya. Wah ini saya belum dikasih tahu malah. Hoooh. Jadi artinya memang sesungguhnya daulat itu ada di komisi. Daulat itu ada di komisi. Benar apa yang disampaikan Pak TBH, dahulu kita jauh lebih tertib. Baleg itu fungsinya sinkronisasi dan harmonisasi. Kecuali ada yang sifatnya beririsan atau bertentangan dengan undang-undang lain atau tempat lain. Nah ini sekarang memang Baleg sudah menjadi salah satu, ini Pak Sturman mohon izin, bagian dari yang hidup sendiri dan narsis-narsis sendiri. Bikin undang-undang, "Saya didatangi Desi Ratnasari, ya senang dong didatangi. Mas, tolong dong, bikinin Undang-Undang Psikolog". Ya Desi Ratnasari, Tenda Biru, ya Pak Utut hanyut. Brigitta kalau ke Baleg juga saya hanyut, ...ya.

Yang ketiga, Komisi, ini pengembangan strategi sesuai kewenangan kita masing-masing ya Pak, yang ketiga, Komisi I DPR RI mendukung Bakamla terhadap peta jalan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan dalam upaya menciptakan Tata Kelola Organisasi/Pemerintahan yang baik di lingkungan Bakamla dan pemangku kepentingan maritime, maritim. Ini jangan maritime, Bahasa Inggris. Maritim saja. Guna mencapai tujuan kelembagaan Bakamla dan Tata Kelola Keamanan Laut yang kuat. Ini kami coba simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan. Soal pawang memawang tadi *enggak* bisa saya masukkan, walaupun itu Bapak resapi saja, *gitu*. Bahwa semua ada pawangnya, itu yang *ngomong* DR. Sukamta, mana orangnya? Oh sudah pergi dia. Ini mohon teman-teman setuju ya ini ya? Bagaimana, setuju?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pimpinan, Pimpinan, saya hanya masalah bahasanya saja.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Silakan.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kalau berkenan. Walaupun ini juga *ndak* masalah.

Komisi I DPR RI dan Bakamla sepakat “urgensinya” penyusunan, ini sepertinya *ngambang*. Apakah tidak misalnya “urgent”-nya penyusunan atau pentingnya penyusunan. ‘

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Oke, ganti “sepakat pentingnya penyusunan”.

Urgensi ini dulu Bahasa Belanda. Urgensi, ya. Karena ketularan *Indonesia Coast Guard* tadi, ini kali. Memang Belanda itu dulu *ngajari* kita lima hal, yaitu *beleid*, *beleid* itu perumusan kebijakan, kemudian *stuurdaat*, *regellendaat*, ini *regelendaat*, *beheirdaat*, terakhir pengawasan *toezicht hooden daat*. Itu Belanda, Pak. Kok Pak Utut bisa Bahasa Belanda? Dulu pernah di Eropa lama, Pak. Catur, Farah. Farah baru melepas masa lajangnya, jadi wajahnya banyak berseri-seri. Kalau Pak Utut, saking jarangnyanya, rambutnya kering. Sama sama Bu Itet, juga kering.

Ini tiga hal sudah, teman-teman setuju ya, Pak Jenderal Lodewijk setuju ya? Ini semua dukungan. Saya serahkan ke Pak Sestama.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Setuju juga?

Baik, karena kedua belah pihak setuju, saya gedok, nomor 1 Pak HBK, setuju? Saya ini kalau sama Pak HBK, reputasi beliau ini Pak, paling takut saya sama Pak HBK. Tapi sekarang berkawan. Karena berkawan, dari takut, sekarang menjadi aman. Ini kita gedog ya? Benar ini. Kita gedog nomor 1.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 2 kita gedog.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 3, bismillah, Undang-Undang ini jadi.

(RAPAT: SETUJU)

Wah, yang doain orang jarang berdoa, Pak, biasanya didengar.

Saya persilakan *closing statement* dari Pak Sestama.

SESTAMA BAKAMLA RI (LAKSAMANA MUDA TNI S. IRAWAN, M.H.) :

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami Pak, atas nama Bakamla, jadi Pak Ka. Bakamla juga, seluruh personil Bakamla ini yang hadir, mengucapkan terima kasih atas segala undangan ini, Pak. Ini sungguh luar biasa bagi kami. Ini menambah wawasan kami, terus menambah juga terutama yang paling bagus adalah semangat kami, Pak. Di Bakamla ini, Bapak tahu Bakamla sekarang masih berumur 6 tahun, ya tapi Bapak terus mendorong Bakamla ini, sampai hari ini. Jadi kami betul-betul, kalau kami *enggak* bisa kerja, kami malu, karena kami diawasi oleh Bapak-Bapak, kami dibantu oleh Bapak-Bapak, semua mungkin sampai hari ini.

Saya sangat bangga, sekali lagi, kepada Bapak-Bapak semua, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi.

Kemudian semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak-Bapak semua, dengan adanya hal seperti ini, karena semata-mata kita, Bakamla ini, nanti dibentuk sesuai dengan Undang-Undang ataupun nanti akan diharapkan oleh negara ini. Ini adalah kepentingan negara. Kepentingan nasional kita semua. Demi perairan kita yang aman, damai, dan disegani, baik oleh lawan maupun oleh kawan kita.

Terima kasih Pak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DRS. UTUT ADIANTO):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ses, jadi kalau Pak Ses ketemu mitra-mitra Komisi I lainnya, bilang saja, "Kalau soal Komisi I itu baik, kita pakai rumusan Warung Padang, Pak, bila Anda puas, ceritakan kepada kawan, bila Anda tidak puas, laporkan kepada kami". Dengan mengucap, itu Warung Ampera begitu Pak, rumusnya, Nasi Padang.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, dengan ini Rapat Dengar Pendapat dengan Bakamla kami nyatakan ditutup.

Semoga kerja kita adalah bagian dari ibadah kita, semoga niat baik kita diijabah oleh Gusti Allah SWT.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.03 WIB)
(KETUK PALU: 3X)**

**Jakarta, 13 September 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,**

**SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**